



**BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WIILAYAH III
PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAPORAN KINERJA



**TAHUN
2024**

LAPORAN
KINERJA 2024
Balai Pelestarian Kebudayaan
Wilayah III

Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi

**LAPORAN
KINERJA 2024
Balai Pelestarian Kebudayaan
Wilayah III**

Diterbitkan oleh,
Balai Pelestarian Kebudayaan
Wilayah III

Penyusun,
Tim Penyusun Laporan Kinerja
BPK Wilayah III Tahun 2024

BPK WILAYAH III
Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung, Batusangkar
Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, 27281
Telepon. 0752-71451
Surel. bpkwil3.sumbar@kemdikbud.go.id
Laman. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsumbar/>
Narahubung. +6282167652777

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2024 dengan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III tahun 2024. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III pada tahun 2024 menetapkan empat sasaran dan lima indikator kinerja. Secara umum Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya permasalahan internal terkait pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia dan permasalahan eksternal terkait sinergitas perlindungan warisan budaya. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III pada tahun 2024. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III pada tahun 2024.

Tanah Datar, 30 Januari 2025
Kepala BPK Wilayah III

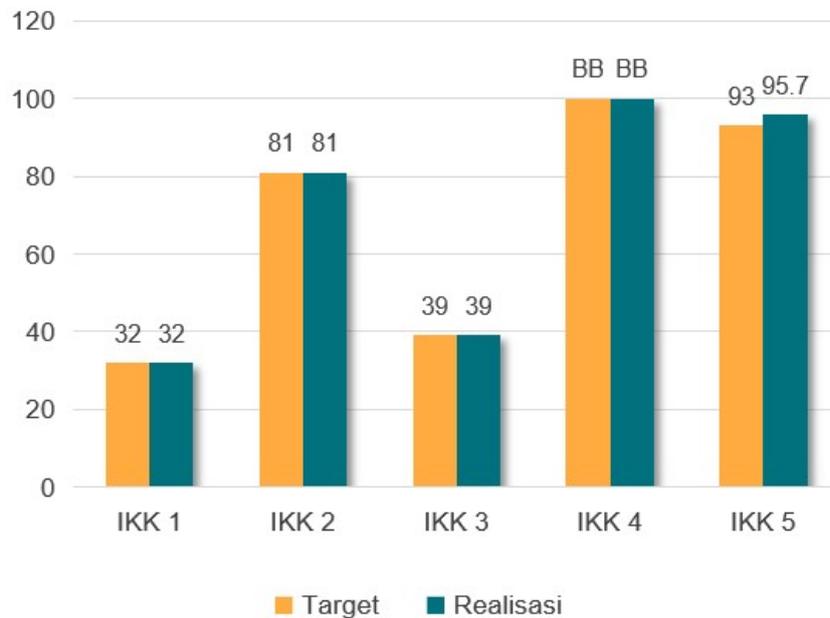


Undri, S.S, M. Si

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Tahun 2024 menyajikan tingkat pencapaian 4 (empat) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Tingkat ketercapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini. Secara umum, capaian kinerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

CAPAIAN KINERJA 2024



Dengan realisasi keuangan pada tahun 2024 adalah 90.75% dari pagu Rp26,171,208,000,-. Dengan rincian realisasi per belanja sebagai berikut:

REALISASI ANGGARAN 2024



KINERJA**2024**

Pada akhir tahun 2023, terjadi perubahan organisasi pada BPK Wilayah III yang semula bernama BPCB Provinsi Sumatra Barat menjadi BPK Wilayah III. Dengan demikian terjadi perubahan Renstra, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja pada BPK Wilayah III.

Berikut trend alokasi anggaran BPK Wilayah III dari tahun 2020 s.d. 2022 (saat bernama BPCB Sumatra Barat) dan 2023 s.d. 2024 (setelah berubah nomenklatur menjadi BPK Wilayah III saat ini):

Tahun	Pagu (Rp.)
2020 (BPCB)	17.638.197.000
2021 (BPCB)	22.665.192.000
2022 (BPCB)	16.349.545.000
2023 (BPK)	20.075.586.000
2024 (BPK)	26.171.208.000

Berdasarkan dari tabel di atas, dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran BPK Wilayah III selama tahun 2023 hingga 2024 mengalami peningkatan, hal tersebut seiring dengan peningkatan target/ sasaran program prioritas Ditjen Kebudayaan.

Selama tahun 2024, terdapat permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, antara lain:

1. Anggaran yang masih terblokir di awal tahun;
2. Tidak tersedianya PPK Type B yang bersertifikat;
3. Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional;
4. Kebijakan efisien anggaran perjalanan dinas.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ kendala yang muncul antara lain:

1. Melengkapi data dukung untuk usulan revisi buka blokir;
2. Peningkatan SDM untuk PPK bersertifikat;
3. Koordinasi dan Reschedul jadwal pengadaan barang dan jasa;
4. Melakukan selfblocking dan revisi kegiatan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar [▶]	1
Ikhtisar Eksekutif [▶]	2
Daftar Isi [▶]	4
Bab 1 Pendahuluan [▶]	5
A. Gambaran Umum [▶]	5
B. Dasar Hukum [▶]	6
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi [▶]	7
D. Isu-Isu Strategis/ Permasalahan [▶]	9
Bab 2 Perencanaan Kinerja [▶]	10
A. Rencana Strategis [▶]	10
B. Program Prioritas [▶]	12
C. Rencana Kerja dan Anggaran [▶]	13
D. Perjanjian Kinerja [▶]	15
Bab 3 Akuntabilitas Kinerja [▶]	18
A. Akuntabilitas Kinerja [▶]	18
B. Realisasi Program/ Agenda Prioritas [▶]	73
C. Realisasi Anggaran [▶]	74
D. Kinerja Lain-Lain [▶]	75
Bab 4 Penutup [▶]	85
Lampiran [▶]	88
1. Perjanjian Kinerja Awal [▶]	88
2. Perjanjian Kinerja Akhir [▶]	90
3. Pengukuran Kinerja [▶]	92
4. Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu [▶]	98

BAB I

Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III merupakan satuan kerja/ Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III merupakan hasil dari re-organisasi di lingkungan Ditjen Kebudayaan pada tahun 2022 yang menggabungkan dua satker yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Tanah Datar dan Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Padang.

Kantor Pusat Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III yang sekarang berkedudukan di Tanah Datar beserta kantor unitnya di Kota Padang dipimpin oleh seorang Kepala bernama Undri, S.S, M. Si dengan jumlah SDM sebanyak 65 orang PNS, 12 orang Juru Pelihara Cagar Budaya PNS, 6 orang PPPK, 16 orang PPNPN, 75 orang Juru Pelihara Cagar Budaya Non PNS, dan 11 orang Pegawai Alih Daya. Wilayah kerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III melingkupi Provinsi Sumatera Barat.



Alamat Kantor

Kantor Pusat BPK Wilayah III
Jl. Sutan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung, Tj.
Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat
27281

Kantor Unit BPK Wilayah III
Jl. Raya Belimbing No.16 A, Kuranji,
Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat
25173

Jumlah Sumber Daya Manusia



B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan;

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 477 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Kebudayaan.

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 477 tahun 2022 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Kebudayaan.

TUGAS & FUNGSI **BPK III**

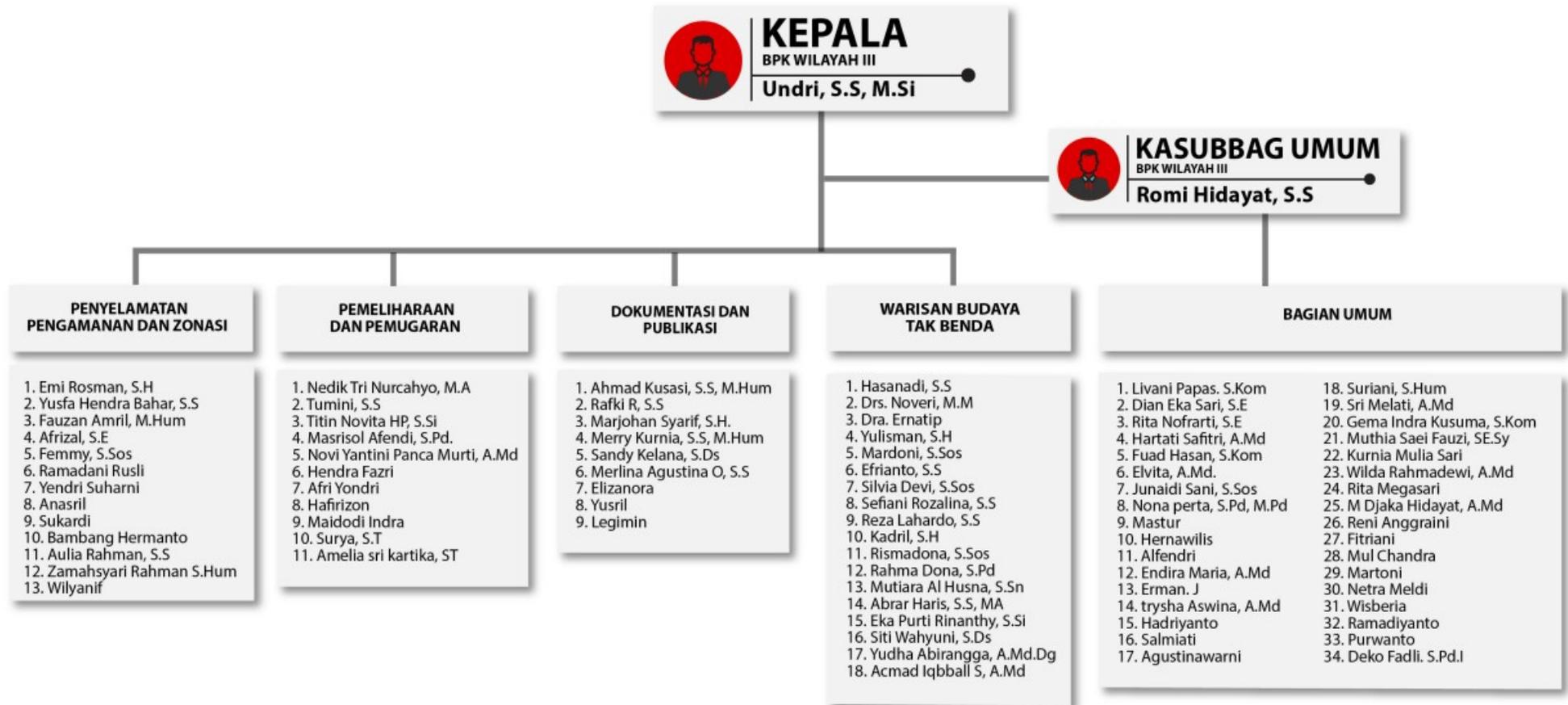
“Melaksanakan Pelestarian **Cagar Budaya** dan **Objek Pemajuan Kebudayaan**.”

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 33 tahun 2022 -



Dalam melaksanakan tugasnya BPK Wilayah III dipimpin satu orang Kepala dan memiliki satu orang Kepala Sub Bagian Umum seperti yang tertera pada Permendikbud Nomor 33 tahun 2022. Kasubbag Umum dibantu oleh empat kelompok kerja dan satu kelompok urusan umum yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional tertentu/ Pamong Budaya dan fungsional umum. Berikut bagan struktur organisasi BPK Wilayah III:

STRUKTUR ORGANISASI BPK WILAYAH III SUMATERA BARAT



D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

1. Isu-isu Strategis

- a. Pengelolaan Pelestarian Ombilin Coal Mining Heritage Sawahlunto (OCMHS) setelah ditetapkan sebagai Situs Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO sejak tahun 2019;
- b. Pengelolaan Pelestarian KCBN Perkampungan Adat Jorong Padang Rahan dan Tanah Bato Nagari Sijunjung sebagai representasi perkampungan dan masyarakat matrilineal Minangkabau;
- c. Pengelolaan Pelestarian Percandian Pulau Sawah Dharmasraya untuk mendukung kegiatan rencana pembebasan lahan karena telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional tahun 2024;
- d. Pengelolaan Pelestarian Kawasan Semen Padang Indarung I Kota Padang dalam rangka pendukung kegiatan ditetapkannya sebagai Cagar Budaya Nasional pada tahun 2024;

2. Peran Strategis

- a. Melakukan kegiatan Edukasi Pelindungan Warisan Budaya kepada masyarakat pemilik/ pengguna/ pengelola Cagar Budaya; Seminar Pelestarian Warisan Budaya yang melibatkan dinas terkait, komunitas dan masyarakat; DED Pemugaran Penjara Orang Rantai sebagai bahan acuan pelestarian Penjara Orang Rantai; Photogrammetry Cagar Budaya yang merekam warisan budaya yang ada di Sawahlunto; Giat Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, komunitas, pelaku UMKM, pemangku adat sebagai aktifasi 7 kab/kota yang dilalui oleh jalur kereta api.
- b. Melakukan kegiatan pendukung Festival Matrilineal Perkampungan Adat Nagari Sijunjung/ Alek Mandeh sebagai salah satu kegiatan pendukung untuk pengusulan sebagai Warisan Dunia. Kegiatan melibatkan pemerintah pusat, daerah, pemangku adat, tenaga pendidik, peserta didik dan masyarakat.
- c. Melakukan Ekskavasi Penyelamatan Percandian Pulau Sawah Munggu XI sebanyak empat tahapan sebagai langkah percepatan pelestarian dan melakukan simulasi ekskavasi untuk publik dan pemanduan kegiatan Susur Sungai Batanghari sebagai bentuk dukungan rangkaian kegiatan rencana pembebasan lahan kawasan percandian Padang Roco dan Pulau Sawah. Dimana Percandian Padang Roco telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional pada tahun 2024.
- d. Melaksanakan kegiatan Zonasi dalam bentuk FGD dan Seminar Hasil dalam rangka pendukung pelestarian Kawasan Semen Padang Indarung I yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional tahun 2024.

BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Visi, Misi, dan Tujuan Strategis

Melalui Kongres Kebudayaan Indonesia 2018, disepakati ada tujuh Agenda Strategis dalam Strategi Kebudayaan 2020-2040:

1. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
2. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional
3. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional
4. Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem
6. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan
7. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan.

Ketujuh Agenda ini bermuara pada sebuah **visi tentang Indonesia 2040 yakni: "Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan dan menyejahterakan"**. Keseluruhan uraian yang disebut Strategi Kebudayaan tersebut adalah rujukan utama dari pengambilan kebijakan budaya di tingkat pusat dan daerah hingga 2040.

Dalam pengembangan misinya, BPK Wilayah III **menyelaraskan dengan misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi** yaitu:

1. mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
2. mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; dan
3. mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi

Selaras dengan Visi dan Misi Direktur Jenderal Kebudayaan, maka rumusan tujuan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III tahun 2020-2024 mengacu kepada Sasaran Program Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun Sasaran Program Direktorat Jenderal Kebudayaan yang menjadi acuan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III, antara lain:

1. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Terwujudnya perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional;
3. Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan inklusif;
4. Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas.

Matrik Kinerja

Rencana Kinerja Jangka Menengah:

Tabel Renstra 2023 s.d. 2024 BPK Wilayah III

#	Uraian	Target Renstra 2023	Target Renstra 2024
SP	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat		
IKP 3.2.1	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni		
SK	Meningkatnya Jumlah Event Kebudayaan Daerah	14	32
IKK 3.2.1	Jumlah Event Kebudayaan Daerah (kegiatan)	14	32
SP	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat		
IKP 3.2.2	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan		
SK	Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilindungi	42	81
IKK 3.2.2	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilindungi (unit)	42	81

SP	Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan inklusif		
IKP 3.2.6	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni		
SK	Meningkatnya Jumlah Fasilitas Bidang Kebudayaan yang Dikelola	20	39
IKK 3.2.6	Jumlah Fasilitas Bidang Kebudayaan yang Dikelola	20	39
SP	Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas		
SK	Meningkatnya Tata Kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III	-	BB
IKK	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III minimal BB	-	BB
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III	91	93

B. Program Prioritas 2020 s.d. 2024

BPK Wilayah III belum memiliki program prioritas pada tahun 2020 s.d. 2024. namun, BPK Wilayah III memiliki kegiatan pendukung program prioritas Ditjen Kebudayaan, seperti:

1. Giat Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto
Dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan selama 3 tahun berturut-turut dimulai pada tahun 2023 s.d. 2025 dalam rangka pemantik pelestarian warisan budaya atas penetapan Sawahlunto sebagai Warisan Dunia UNESCO yang melibatkan 7 kab/kota yang dilalui rel kereta api pengangkut hasil tambang batubara.
2. Fasilitas dan Kemitraan Warisan Budaya
Merupakan bantuan Fasilitas Kebudayaan yang diberikan kepada pelaku seni/ budaya
3. Cagar Budaya, ODCB, dan OPK yang Dilindungi
BPK Wilayah III berfokus kepada Cagar Budaya yang berstatus Nasional, diantaranya: KCBN Percandian Padang Roco, Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto, dan KCBN Pabrik Semen Indarung I.

C. Rencana Kerja dan Anggaran

Sebagai pengguna anggaran, BPK Wilayah III menyusun rencana kerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pada akhir tahun 2023, terjadi perubahan organisasi pada BPK Wilayah III yang semula bernama BPCB Provinsi Sumatra Barat menjadi BPK Wilayah III. Dengan demikian terjadi perubahan Renstra, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja pada BPK Wilayah III.

Berikut trend alokasi anggaran BPK Wilayah III dari tahun 2020 s.d. 2022 (saat bernama BPCB Sumatra Barat) dan 2023 s.d. 2024 (setelah berubah nomenklatur menjadi BPK Wilayah III saat ini):

Tahun	Pagu (Rp.)
2020 (BPCB)	17.638.197.000
2021 (BPCB)	22.665.192.000
2022 (BPCB)	16.349.545.000
2023 (BPK)	20.075.586.000
2024 (BPK)	26.171.208.000

Berdasarkan dari tabel di atas, dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran BPK Wilayah III selama tahun 2023 hingga 2024 mengalami peningkatan, hal tersebut seiring dengan peningkatan target/ sasaran program prioritas Ditjen Kebudayaan.

Adapun rencana kerja dan anggaran tahun 2024 BPK Wilayah III dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

RENCANA KERJA TAHUNAN
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH III TA 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Target Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output	Komponen	Alokasi Biaya (Rp)
Meningkatnya Jumlah Event Kebudayaan Daerah	Jumlah Event Kebudayaan Daerah	[6963] Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya	[6963.PEG] Konferensi dan Event	12	[6963.PEG.001] Giat Warisan Budaya	[6963.PEG.001.100] Internalisasi dan Aktualisasi Warisan Budaya	3.687.075.000
Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilindungi	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilindungi		[6963.ABH] Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan, dan Kebudayaan	12	[6963.ABH.001] Naskah Pelestarian Warisan Budaya	[6963.ABH.001.100] Studi Pelestarian Warisan Budaya	608.605.000
			[6963.QMA] Data dan Informasi Publik	11	[6963.QMA.001] Data dan Informasi Warisan Budaya	[6963.QMA.100] Inventarisasi Warisan Budaya [6963.QMA.101] Dokumentasi dan Publikasi Warisan Budaya	115.140.000 861.645.000
			[6963.RDN] OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	18	[6963.RDN.001] Cagar Budaya, ODCB yang Dilindungi	[6963.RDN.001.100] Pelestarian Cagar Budaya dan ODCB	5.460.770.000
Meningkatnya Jumlah Fasilitas Bidang Kebudayaan yang Dikelola	Jumlah Fasilitas Bidang Kebudayaan yang Dikelola		[6963.QDD] Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	25	[6963.QDD.001] Fasilitas dan Kemitraan Warisan Budaya	[6963.QDD.001.100] Fasilitas Pemanfaatan Warisan Budaya	581.050.000
Meningkatnya Tata Kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III minimal BB; Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III	[5180] Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	[5180.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	[5180.EBA.956] Layanan BMN	[5180.EBA.956.100] Penyusunan Laporan BMN	10.000.000
				1	[5180.EBA.962] Layanan Umum	[5180.EBA.962.105] Layanan Ketatausahaan	981.530.000
				1	[5180.EBA.994] Layanan Perkantoran	[5180.EBA.994.001] Gaji dan Tunjangan	5.794.918.000
						[5180.EBA.994.001] Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	4.006.818.000
			1	[5180.EBB] Layanan Sarana dan Prasarana Internal	[5180.EBB.951] Layanan Sarana Internal	[5180.EBB.951.996] Pengadaan Perangkat dan Pengolah Data Komunikasi	2.107.400.000
[5180.EBB.971] Layanan Prasarana Internal	[5180.EBB.971.51] Rehab/ Renovasi Bangunan	1.956.257.000					

D. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, BPK Wilayah III menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra	Target PK 2024	%
Meningkatnya Jumlah Event Kebudayaan Daerah	Jumlah Event Kebudayaan Daerah	Kegiatan	32	32	100
Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilindungi	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilindungi	Unit	81	81	100
Meningkatnya Jumlah Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang Dikelola	Jumlah Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang Dikelola	Orang/ Kelompok Masyarakat	39	39	100
Meningkatnya Tata Kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III minimal BB;	Predikat	BB	BB	100
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III	Nilai	93	93	100

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, BPK Wilayah III menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2024. Penetapan target perjanjian kinerja telah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya, target rencana strategis, serta ketersediaan alokasi anggaran, yang dilakukan melalui reviu rencana strategis.

Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja BPK Wilayah III tahun 2024.

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 - Awal

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2024
[SK 1.0] Meningkatnya Jumlah Event Kebudayaan Daerah	[IKK 1.1] Jumlah Event Kebudayaan Daerah	32
[SK 2.0] Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilindungi	[IKK 2.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilindungi	81
[SK 3.0] Meningkatnya Jumlah Fasilitas Bidang Kebudayaan yang Dikelola	[IKK 3.1] Jumlah Fasilitas Bidang Kebudayaan yang Dikelola	39
[SK 4.0] Meningkatnya Tata Kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III	[IKK 4.1] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III minimal BB	BB
	[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III	93
Kode	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp.)
6963	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	11.314.285.000,-
5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	15.467.723.000,-
Total		26.782.008.000,-

Terjadi perubahan organisasi dan tata kelola di lingkungan Ditjen Kebudayaan termasuk di dalamnya perubahan OTK BPCB Sumatra Barat yang digabungkan dengan BPNB Sumatra Barat menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III sejalan dengan perubahan Renstra dan target yang ada di Perjanjian Kinerja.

LAPORAN
KINERJA
 2024

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 - Akhir

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2024
[SK 1.0] Meningkatnya Jumlah Event Kebudayaan Daerah		[IKK 1.1] Jumlah Event Kebudayaan Daerah	32
[SK 2.0] Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilindungi		[IKK 2.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilindungi	81
[SK 3.0] Meningkatnya Jumlah Fasilitas Bidang Kebudayaan yang Dikelola		[IKK 3.1] Jumlah Fasilitas Bidang Kebudayaan yang Dikelola	39
[SK 4.0] Meningkatnya Tata Kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III		[IKK 4.1] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III minimal BB	BB
		[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III	93
Kode	Nama Kegiatan		Anggaran (Rp.)
6963	Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala		11.314.285.000,-
5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan		14.856.923.000,-
Total			26.171.208.000,-

Pada tahun 2024, BPK Wilayah III mengalami satu kali revisi Perjanjian Kinerja yang disebabkan oleh pemotongan pagu program Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala sebesar Rp610.800.000,-. Penyesuaian alokasi anggaran pada Perjanjian Kinerja dari anggaran sebesar Rp. 26.782.008.000 menjadi Rp. 26.171.208.000.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Akuntabilitas Kinerja

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Kode	Sasaran Program /Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	2023			2024		
			target	real	capaian	target	real	capaian
SP	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat							
IKP 3.2.1	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%						
SK	Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah							
IKK 3.2.1.3	Jumlah event kebudayaan daerah	kegiatan	14	31	221%	32	32	100%
SP	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional							
IKP 3.2.2	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	%						
SK	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan							
IKK 3.2.2.2	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	unit	42	80	190%	81	81	100%
SP	Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif							
IKP 3.2.6	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang	%						

	pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni							
SK	Meningkatnya Jumlah fasilitas bidang kebudayaan yang dikelola							
IKK 3.2.6.2	Jumlah fasilitas bidang kebudayaan yang dikelola	orang/ kel masyara kat	20	39	195%	39	39	100%
SP	Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas							
SK	Meningkatnya Tata Kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III	%						
IKK	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III minimal BB	Kategori	-	-	-	BB	BB	100%
IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III	Nilai	91	92. 9	102.1%	93	95. 7	102.9%

SP. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat

IKP Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni

SK Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah

Ketercapaian Sasaran Kegiatan ke dua Meningkatnya Jumlah Event Kebudayaan ini dilaksanakan oleh dua tim kerja teknis yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala dengan memerhatikan tugas dan fungsi BPK Wilayah III. Tim Kerja tersebut yaitu tim kerja Dokumentasi dan Publikasi dan tim kerja WBTB. Ketercapaian sasaran kegiatan ini didukung oleh satu indikator kinerja kegiatan.

IKK Jumlah Event Kebudayaan Daerah

Event yang dimaksud adalah perhelatan seni dan/atau budaya yang menghadirkan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam bentuk festival, pameran, dialog, lokakarya maupun perhelatan budaya lainnya sebagai wadah bagi pelaku budaya untuk menuangkan karya ciptanya dan membangun ekosistem

kebudayaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan c.q. Balai Pelestarian Kebudayaan.

Metode Penghitungan:

Metode Penghitungan	:	Jumlah event kebudayaan yang diselenggarakan
Satuan	:	Kegiatan
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Kelompok Kerja Pelaksana	:	1. Kelompok Kerja Dokumentasi dan Publikasi 2. Kelompok Kerja Warisan Budaya Tak Benda 3. Kelompok Kerja Tata Usaha
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Pada tahun 2024 capaian IKK Jumlah Event Kebudayaan Daerah di BPK Wilayah III bisa dihitung sebagai berikut:

Realisasi = Jumlah kegiatan terlaksana yang didapatkan dari laporan kegiatan masing-masing tim kerja pengampu,

Dokumen	Target	Realisasi	%
DIPA	12	32	266.7%
PK	32	32	100%

Sehingga didapatkan capaian IKK Jumlah Event Kebudayaan Daerah pada tahun 2024 adalah sebesar 100% jika dibandingkan dengan target dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024. Sedangkan jika dibandingkan dengan target kinerja pada dokumen DIPA tahun 2024 maka capaian kinerja melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 12 kegiatan atau sebesar 266.7%.

Pada tahun 2024 fokus kegiatan BPK Wilayah III pada IKK Jumlah Event Kebudayaan Daerah adalah Giat Warisan Tambang Barubara Ombilin Sawahlunto, Festival Matrilineal Sijunjung dan 50 Kota, Festival Danau Maninjau, dan Pameran Mentawai.

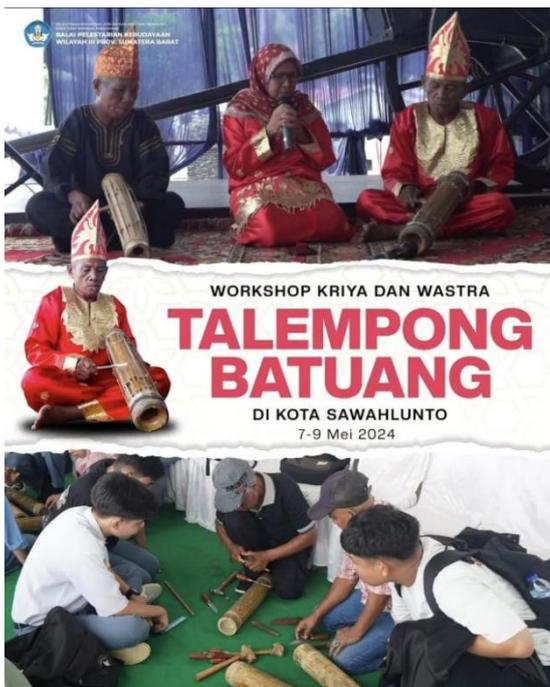
Berikut merupakan 32 kegiatan untuk ketercapaian capaian kinerja IKK Jumlah Event Kebudayaan Daerah pada tahun 2024:

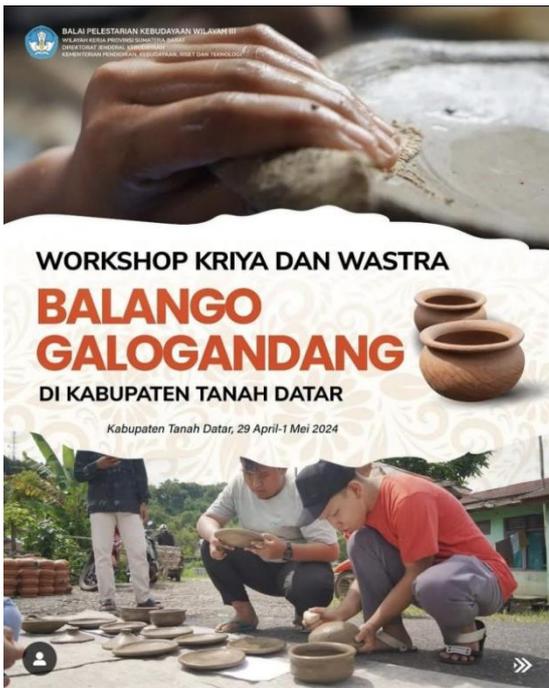


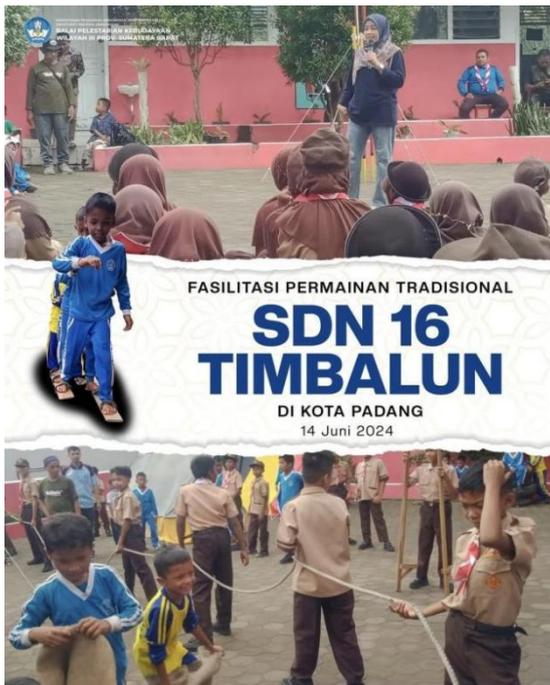


LAPORAN
KINERJA
2024





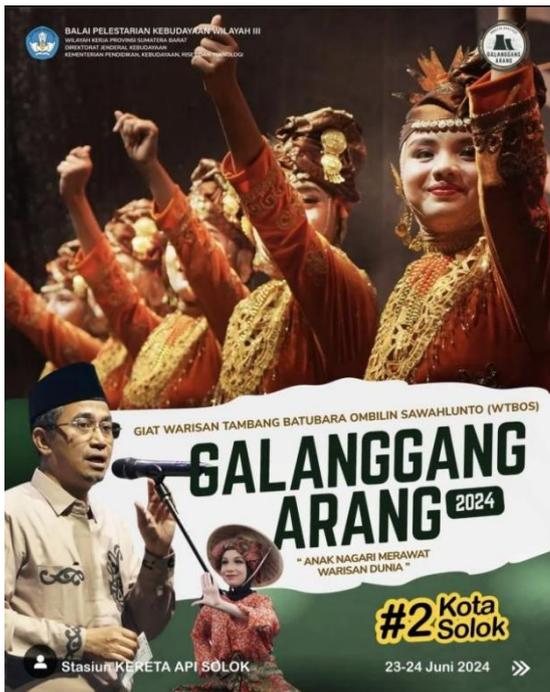
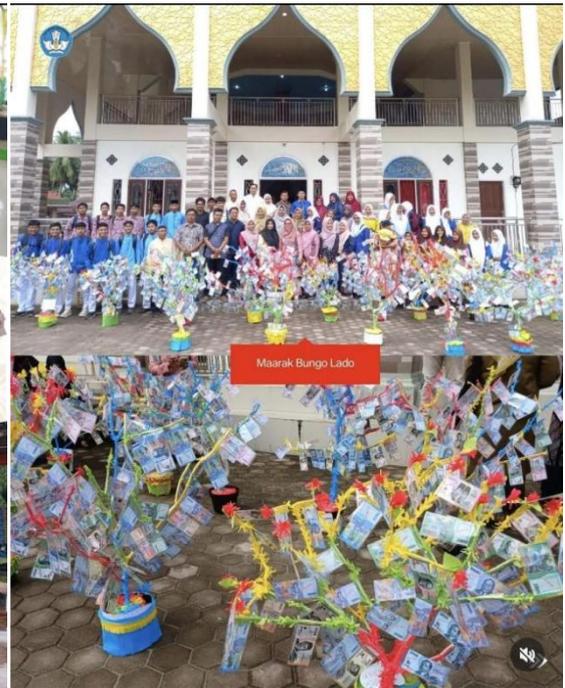




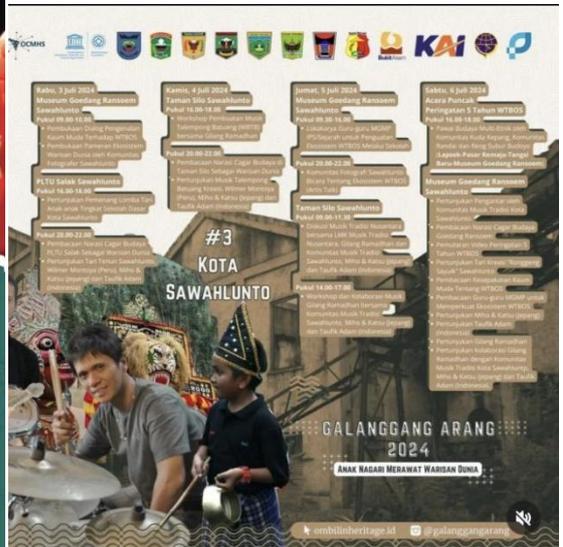


Hari kedua dilanjutkan merapikan tingkuluok kompong. Setelah itu membuat tingkuluok baik. Pelatih memperagakan cara membuat tingkuluok baik yang kemudian diikuti oleh peserta. Kegiatan ini berlangsung secara berulang-ulang dipandu oleh pelatih sehingga terbentuk tingkuluok baik.

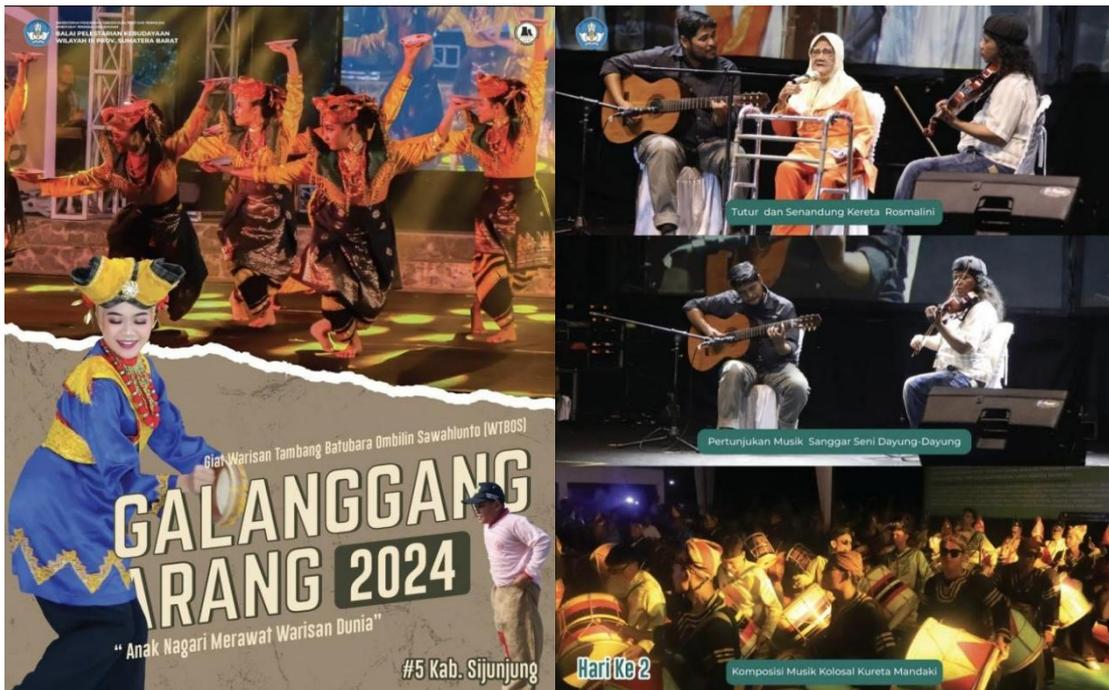
LAPORAN
KINERJA
2024



LAPORAN
KINERJA
2024



LAPORAN
KINERJA
2024

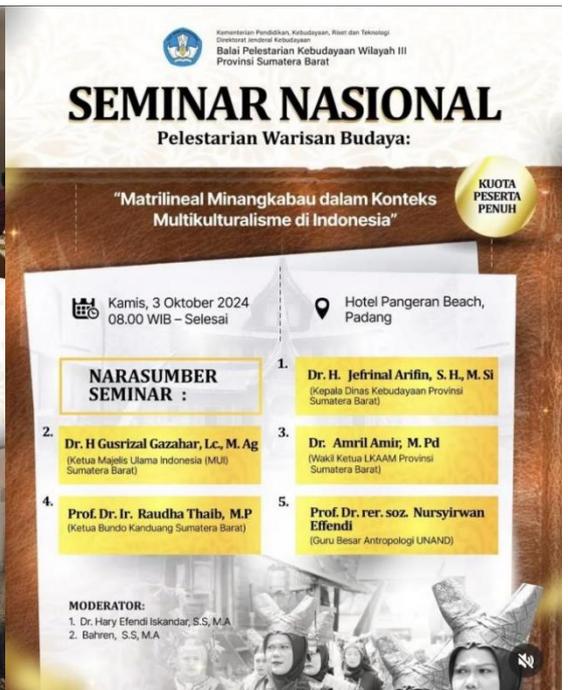


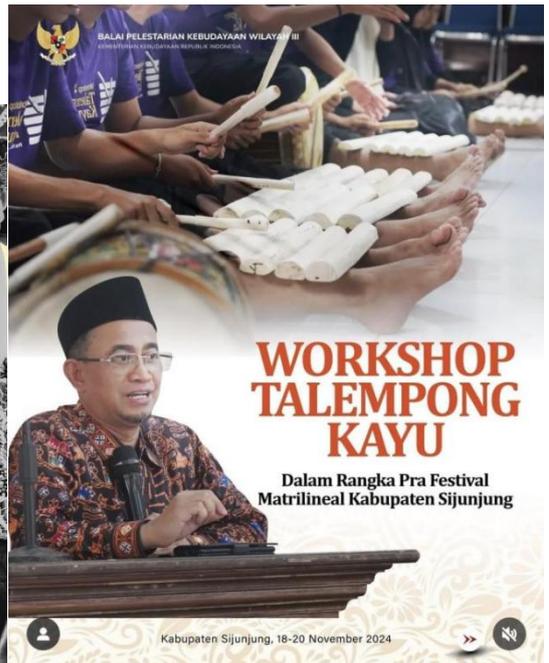
LAPORAN
KINERJA
2024



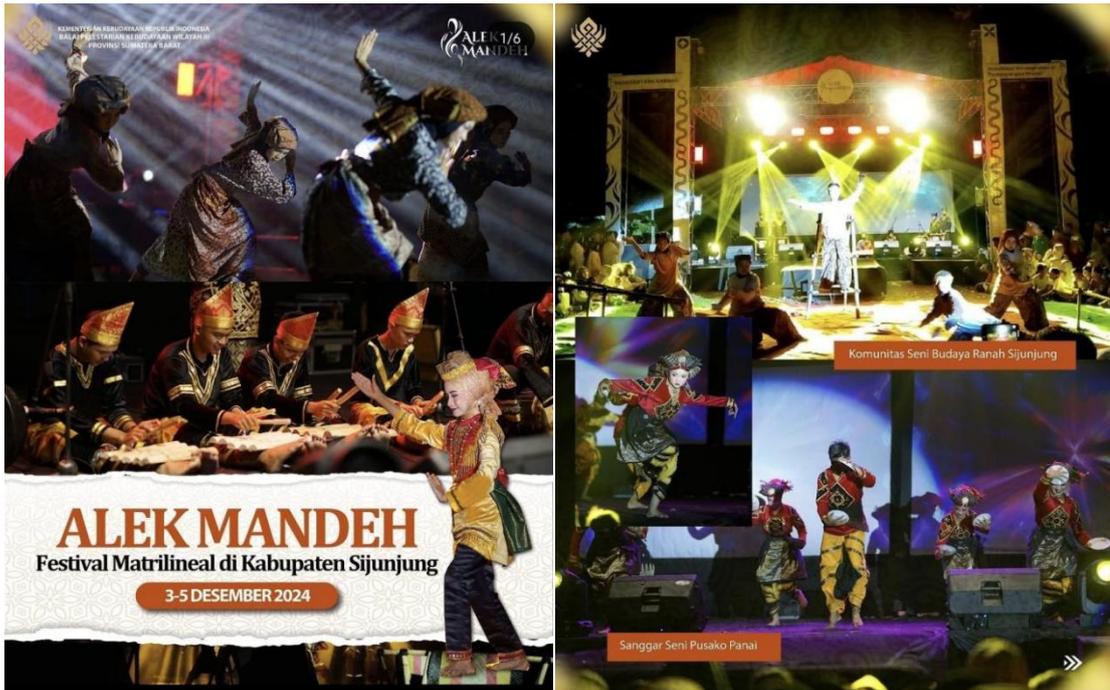
LAPORAN
KINERJA
2024







LAPORAN
KINERJA
2024



Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 dengan target 14 kegiatan dan capaian 31 kegiatan atau sebesar 221%, maka pada tahun 2024 terdapat peningkatan target menjadi 32 kegiatan dengan realisasi 100%. Perbandingan capaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir Renstra	% Capaian Akhir Renstra
2023	14	31	221%	32	96.9%
2024	32	32	100%	32	100%

Program/kegiatan terkait yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan prioritas seperti Giat WT BOS yang melibatkan 8 kab/kota yang ada di Sumatra Barat, sehingga kegiatan yang semula 1 kegiatan besar bisa dilaksanakan di 8 kab/kota dan menambah capaian dari target yang ditetapkan.
2. Festival Matrilineal yang dilaksanakan di 2 kabupaten yaitu Sijunjung dan 50 Kota dilaksanakan menjadi beberapa rangkaian kegiatan seperti, workshop, seminar, pameran, edukasi, dan permainan tradisional. Sehingga rangkaian tersebut menambah capaian realisasi yang semula 2 kegiatan menjadi 10 kegiatan.
3. Festival Danau Maninjau dilaksanakan di Kab. Agam dengan rangkaian kegiatan seperti workshop, seminar, pameran, edukasi, dan permainan tradisional.
4. Pameran dan edukasi di Kep. Mentawai dengan target 1 kegiatan dengan pelaksanaan di lokasi yang sama dengan jenis kegiatan yang berbeda sehingga capaian menjadi 2 kegiatan.
5. Pameran pendukung event daerah juga turut membantu dalam ketercapaian kinerja IKK Jumlah Event Kebudayaan Daerah, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan undangan daerah, dapat dilaksanakan dengan optimalisasi anggaran dari sisa-sisa kegiatan, sehingga tahun 2024 tercapai 5 kegiatan yaitu: Pameran Pamalayu Dharmasraya, Pameran PKD Kab. 50 Kota, Pameran Mentawai, Pameran Kormi, dan Pesona Minangkabau.
6. Juga dilaksanakan seminar warisan budaya dan sinergitas pelestarian warisan budaya dengan capaian 2 kegiatan.

Realisasi Anggaran

Berikut rincian penyerapan anggaran sasaran/indikator kinerja kegiatan Jumlah Event Kebudayaan Daerah tahun 2024:

LAPORAN
KINERJA
 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi	% Daya Serap
Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah	Jumlah event kebudayaan daerah	3.461.326.000	3.320.947.557	95.94

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp140.378.443,- merupakan akumulasi sisa belanja bahan, honorarium, dan perjadin yang tidak bisa dioptimalisasi lagi karena keterbatasan waktu dan tenaga pelaksana.

SP. Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional

IKP Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan

SK Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi

IKK Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda (Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia).

Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi (Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).

Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi meliputi Cagar Budaya, ODCB dan OPK yang Dilestarikan (termasuk di dalamnya Naskah Pelestarian ODCB, CB, dan OPK dan Data dan Informasi Pelestarian ODCB, CB, dan OPK)

Ketercapaian IKK Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilindungi ditandai dengan peningkatan jumlah warisan budaya yang dilestarikan, termasuk di dalamnya naskah pelestarian warisan budaya, data dan informasi warisan budaya, dan cagar budaya, ODCB, dan OPK yang dilestarikan) pada Tahun 2024 yaitu sebanyak 81 unit. IKK ini dilaksanakan oleh empat tim kerja teknis yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala dengan memerhatikan tugas dan fungsi BPK Wilayah III. Tim kerja tersebut yaitu Tim Kerja Penyelamatan, Pengembangan dan Zonasi (P2Z); Pemeliharaan dan Pemugaran (PP); Dokumentasi dan Publikasi (Dokpub); dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) (*dapat dilihat pada BAB I struktur organisasi BPK Wilayah III*).

Berikut merupakan metode perhitungan capaian IKK Jumlah CB dan WBTB yang dilindungi:

Metode Penghitungan	: Metode penghitungan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi adalah $S = a + b + c$
Keterangan	: S = Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi a = Naskah Pelestarian Warisan Budaya b = Data dan Informasi Warisan Budaya c = Cagar Budaya, ODCB dan OPK Yang Dilindungi
Satuan	: Unit

Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Kelompok Kerja Pelaksana	: 1. Kelompok kerja Penyelamatan, Pengamanan, dan Zonasi 2. Kelompok kerja Pemugaran dan Pemeliharaan 3. Kelompok Kerja Warisan Budaya Tak Benda 4. Kelompok kerja Dokumentasi dan Publikasi 5. Kelompok kerja Tata Usaha
Sumber Data	: Laporan Internal
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan

Capaian IKK Jumlah CB dan WBTB yang Dilindungi pada tahun 2024 adalah 81 unit dari target yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 atau sebesar 100%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target pada dokumen DIPA tahun 2024 yaitu 41 unit dengan capaian 81 unit atau sebesar 197.6%.

Pada tahun 2024, BPK Wilayah III berfokus pada situs yang telah ditetapkan dan berperingkat Nasional dan yang berpotensi Nasional. Situs yang berperingkat Nasional seperti: Kawasan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto; KCBN Percandian Padang Roco, Kab. Dharmasraya; dan Kawasan Pabrik Semen Indarung I, Kota Padang. Sedangkan situs yang berpotensi Nasional adalah: Percandian Pulau Sawah, Kab. Dharmasraya; Komplek Percandian Tanjung Medan, Kab. Pasaman; Rumah Tan Malaka, Kab. 50 Kota dan Goa Lidah Air, Kab. 50 Kota.

Berikut capaian kinerja IKK Jumlah CB dan WBTB yang Dilindungi tahun 2024:

Dokumen	Target	Realisasi	%
DIPA	41	81	197.6%
PK	81	81	100%

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja IKK Jumlah CB dan WBTB yang Dilindungi pada tahun 2024 adalah sebesar 197.6% jika dibandingkan dengan target pada dokumen DIPA tahun 2024 yaitu 41 unit. Sedangkan jika dibandingkan dengan target pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 yaitu sebesar 81 unit, maka capaian kinerja IKK Jumlah CB dan WBTB yang Dilindungi pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

Program/kegiatan terkait yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Naskah Pelestarian Warisan Budaya dengan capaian 16 rekomendasi kegiatan dengan capaian sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Naskah Delineasi ODCB dan Zonasi CB: Delineasi Situs Rambahan Bukit Berhalo, Kab Dharmasraya; Delineasi ODCB Kawasan Maek, Kab Limapuluh Kota; Delineasi Kompleks Candi Tanjung Medan, Kab. Pasaman; Zonasi KCBPN Pabrik Semen Indarung I Padang; Delineasi ODCB Kawasan Pertahanan Jepang Pantai Gondorih Kota Pariaman.
 - b. Studi Pelindungan Cagar Budaya/Cagar Budaya Nasional/Potensi Nasional/ODCB, dan Objek Pemajuan Kebudayaan.

2. Data dan Informasi Warisan Budaya dengan capaian 18 layanan:
 - a. Inventarisasi ODCB, CB dan OPK: Inventarisasi ODCB, CB Padri Pasaman; Inventarisasi ODCB Bunker di Padang; Inventarisasi ODCB, CB Rede Pulang Pisang Padang; Inventarisasi OPK Kab. Solok; Inventarisasi OPK Kab. Tanah Datar
 - b. Pendataan ODCB, CB dan OPK, dan Masyarakat Adat di Pulau Sipora Kab. Kep. Mentawai
 - c. Photogrammetry Cagar Budaya Potensi Nasional: Photogrammetry CB ke Amogapasa Jakarta; Photogrammetry CB Pulau Cingkuk, Pessel; Photogrammetry CB Jam Gadang Bukittinggi; Photogrammetry CB Rumah Gadang Solsel; Photogrammetry CB Gunung Padang, Padang; Photogrammetry CB di Sumbar; Photogrammetry RG Kampai Nan Panjang, Tanah Datar.
 - d. Pendokumentasian CBN dan OPK: Pendokumentasian CB OPK Bukittinggi - Agam; Pendokumentasian CB OPK Solok - Sawahlunto; Pendokumentasian CB OPK Sijunjung - Dharmasraya; Pendokumentasian CB OPK Pariaman, Pdg Pariaman, Padang.
 - e. Publikasi Warisan Budaya: Publikasi Melalui Media Cetak; Publikasi Melalui Media Elektronik; Cetak Hasil Karya Penulisan Feature WT BOS; Cetak Buku Zonasi Kawasan CBN Indarung I; Cetak Booklet; Cetak Kalender; Cetak Leaflet; Podcast, Dialog TVRI, Pembuatan Konten Melalui Media TVRI, Bioling dan Permainan Tradisional.
3. Cagar Budaya, ODCB dan OPK Yang Dilestarikan dengan capaian 47 unit:
 - a. Penyelamatan Cagar Budaya, ODCB, dan OPK: Ekskavasi Pulau Sawah Munggu IV, Dharmasraya; Ekskavasi Candi Tj. Bariang, Rao, Pasaman; Percandian Padang Roco, Dharmasraya
 - b. Pengamanan CBBA Shipwreck Nederland Boelongan Kawasan Mandeh, Kab. Pesisir Selatan;
 - c. Pembuatan Sarana Pengamanan Situs: Pembuatan Cungkup dan Pagar Munggu IV Percandian Pulau Sawah, Dharmasraya; Pembuatan Pagar Munggu XI Percandian Pulau Sawah, Dharmasraya; Pembuatan Papan Nama Situs; Pembuatan Pagar Candi Tanjung Medan, Pasaman.
 - d. Pemeliharaan Cagar Budaya: Pemeliharaan Situs Insidentil; Konservasi Candi Tanjung Medan Pasaman; Konservasi Candi Padang Roco, Kab. Dharmasraya; Konservasi Lokomotif Durian Gadang Sijunjung; Studi Observasi Keterawatan Kab. Agam; Studi Observasi Keterawatan Kab. Pesisir Selatan; Studi Observasi Keterawatan Kab. Sijunjung; Studi Observasi Keterawatan Kab. Solok; Studi Observasi Keterawatan Kab.

LAPORAN
KINERJA
2024

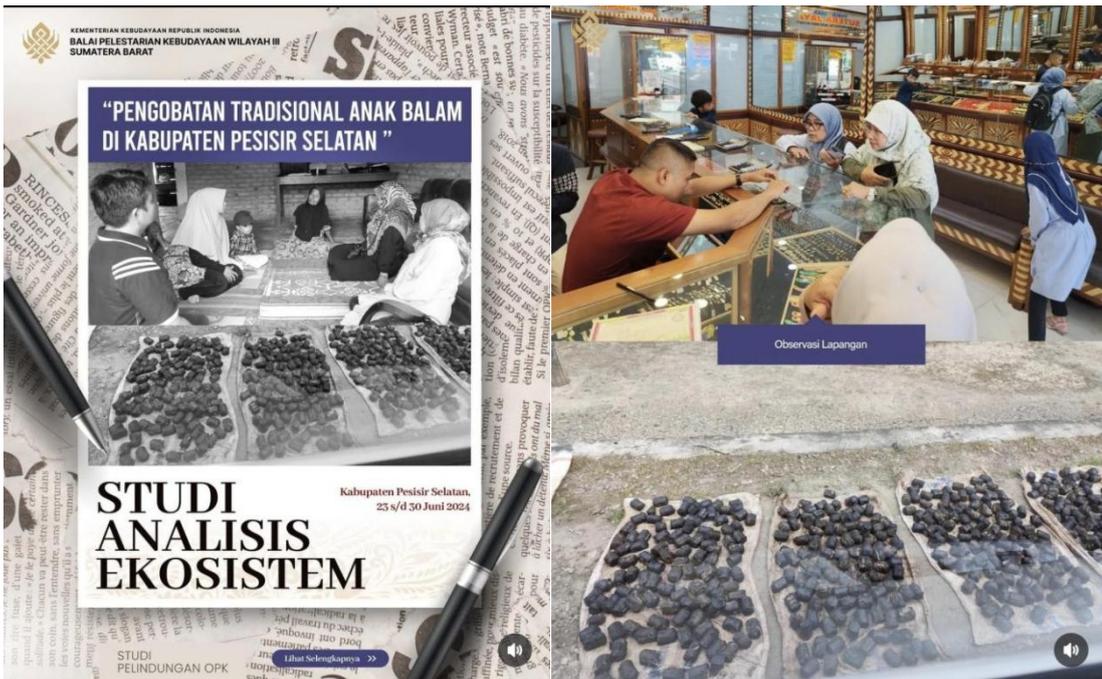
Dharmasraya; Studi Observasi Keterawatan Kota Padang; Studi Observasi Keterawatan Kab. 50 Kota; Studi Observasi Keterawatan Kota Bukittinggi; Studi Observasi Keterawatan Kota Sawahlunto; Konservasi Batu Menhir di Kabupaten Lima Puluh Kota; Konservasi Surau Syekh Burhanuddin di Kab. Padang Pariaman; Studi Observasi Keterawatan Kab. Tanah Datar; Konservasi Prasasti di Kabupaten Tanah Datar.

- e. Pemugaran Cagar Budaya: Pemugaran Kawasan Batang Arau, Padang; Pemugaran Penjara Orang Rantai, Sawahlunto; Pra Pemugaran KCBN Percandian Padang Roco Dharmasraya; Pra Pemugaran Candi Tanjung Medan, Pasaman; Penataan lingkungan Prasasti Panningahan Kab. Solok.
- f. Penjajakan Kepemilikan Lahan dan Penyiapan Dokumen Terkait Rencana Pembebasan Lahan Candi Padang Roco dan Pulau Sawah di Kab. Dharmasraya: Penjajakan Kepemilikan Lahan; FGD Dok DPPT dan Rencana Pembebasan Lahan KCBN Percandian Pulau Sawah dan Situs Percandian Padang Roco; Brainstorming Pengadaan Tanah.
- g. Pelindungan CB Insidentil Penanganan Kasus CB.
- h. Pemantauan dan Evaluasi Pelindungan Warisan Budaya: Penyusunan SOP; Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Program; Pemantauan keamanan situs oleh Polsus;

Berikut merupakan dokumentasi capaian kinerja IKK Jumlah CB dan WBTB yang Dilindungi pada tahun 2024:



LAPORAN
KINERJA
2024



LAPORAN
KINERJA
2024

BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH III
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

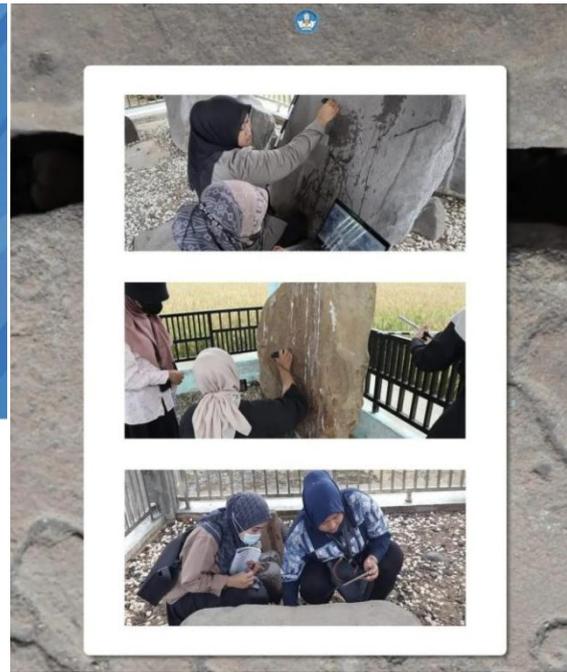
1/5



KONSERVASI CAGAR BUDAYA

PRASASTI KUBU RAJO

Tanah Datar, 7 - 12 Oktober 2024



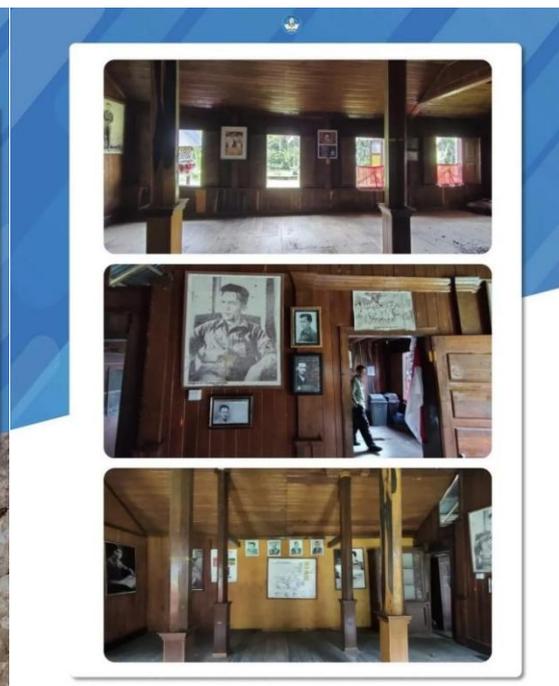
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH III
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN



KOORDINASI DAN SURVEY PELESTARIAN

RUMAH TAN MALAKA DAN GUA LIDAH AIA

Kabupaten 50 Kota, 26 November 2024





Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya regulasi terkait pengaturan ruang berupa Keputusan Menteri tentang Zonasi KCBPN Pabrik Semen Indarung I sehingga nantinya dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam pelestarian, perlindungan, pengembangan, maupun pemanfaatan terutama dalam aspek keruangan.

**FINALISASI ZONASI
KAWASAN CAGAR BUDAYA NASIONAL
PABRIK SEMEN INDARUNG I**
di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
2 - 8 September 2024



BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH III
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

DELINEASI KOMPLEK CAGAR BUDAYA
**CANDI TANJUNG
MEDAN** di Kabupaten Pasaman
26 Agustus s/d 1 September

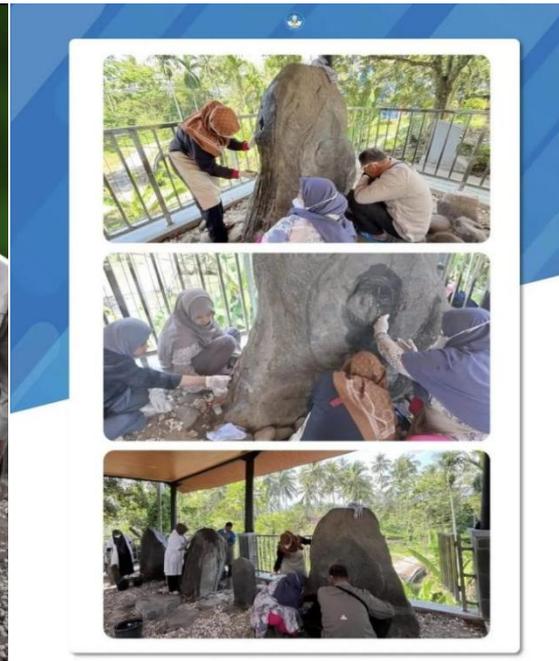
Survei lokasi dan pengambilan titik GPS



Deliniasi Cagar Budaya merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menentukan batas-batas wilayah Cagar Budaya dengan untuk kepentingan pelestarian yang terdapat dalam suatu situs dan/atau kawasan. Batas-batas ditentukan berdasarkan tema tertentu untuk melokalisasi areal yang dibutuhkan dalam rangka menyatakan eksistensi kepentingan pelestarian. Batas-batas yang telah ditentukan kemudian dituangkan dalam bentuk peta, baik peta konvensional maupun peta digital yang nantinya menjadi rekomendasi untuk kegiatan zonasi dan ekskavasi.



Survei lokasi dan pengambilan titik GPS



DELINEASI CAGAR BUDAYA
KAWASAN PERTAHANAN JEPANG PANTAI GONDORIH
di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat

18 s.d 24 Agustus 2024

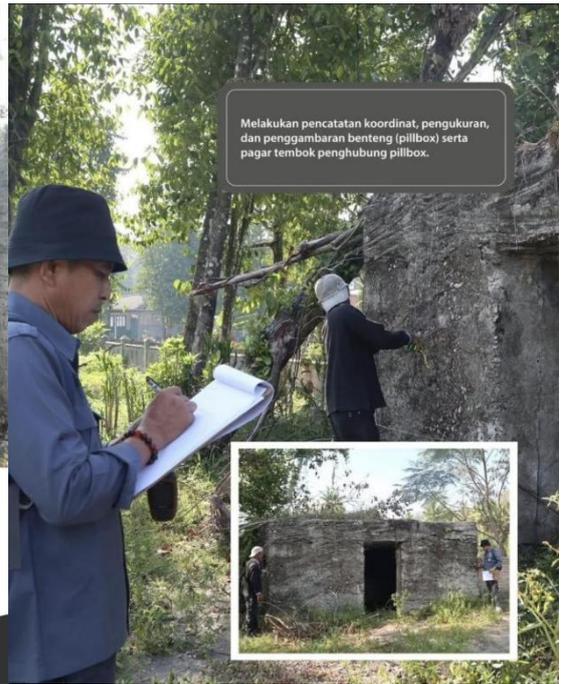


LAPORAN
KINERJA
2024



STUDI PELINDUNGAN
Benteng Pertahanan Jepang (*Pillbox*)
di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat

23 - 30 Juli 2024

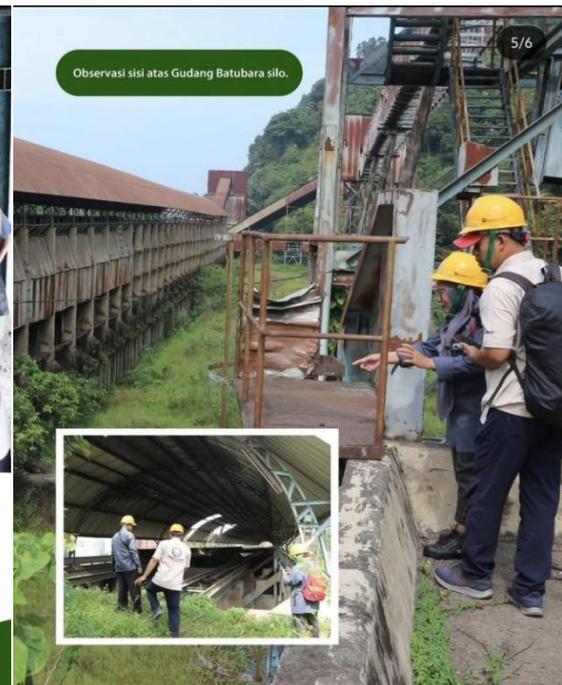


Melakukan pencatatan koordinat, pengukuran, dan penggambaran benteng (*pillbox*) serta pagar tembok penghubung pillbox.



STUDI PELINDUNGAN
WTBOS Cluster C
di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

15 s.d 22 Juli 2024



Observasi sisi atas Gudang Batubara silo.



Tahap Awal

Penyemprotan bata dengan minyak sereh dan menutup bata dengan plastik.



KONSERVASI Candi Tanjung Medan di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat

Tahap Awal 5 - 7 Juni 2024

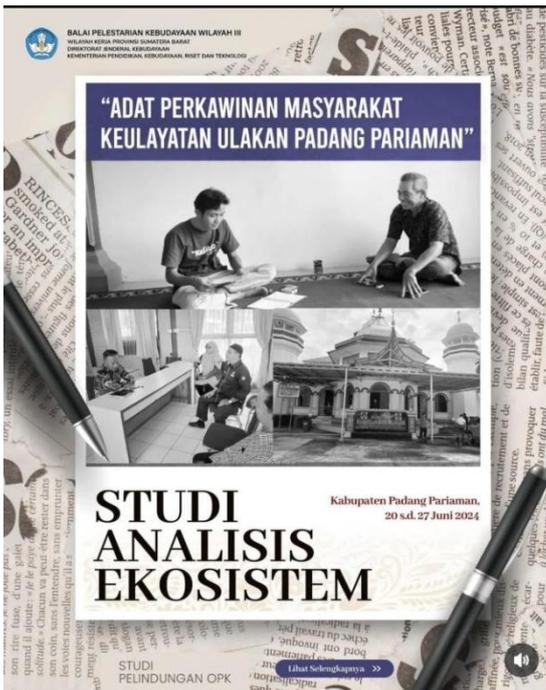
Tahap Lanjutan 19 - 23 Juni 2024



BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH II
WILAYAH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT
DIREKTORAT PELESTARIAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, HIMPUNAN DAN TENAGA LOKAL

Studi Pelindungan
**KAWASAN
SARIBU GONJONG**
Jorong Sungai Dodok Nagari Koto Tinggi
Kecamatan Genuang Orneh
KAB. LIMA PULUH KOTA

Keunikan Kawasan Rumah Gadang Saribu Gonjong (Sarugo) terletak pada arsitektur rumah gadangnya yang mana seluruh rumah gadang di kawasan Sarugo berjarak rapi menghadap ke arah matahari terbit (timur), dengan gonjongnya berjumlah lima gonjong yang menggambarkan rukun islam serta anak tangga yang berjumlah enam anak tangga yang menggambarkan rukun iman



BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH III
WILAYAH KERJA PROVINSI SUMATERA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

EKSKAVASI MUNGGU IV TAHAP I

Kompleks Candi Pulau Sawah Nagari Siguntur,
Kabupaten Dharmasraya

BPK WILAYAH III TAHUN 2024
7 - 16 Mei 2024

Tim Ekskavasi melakukan penggalian kotak 7, 10, 11, dan 12 di Munggu IV Kompleks Candi Pulau Sawah



BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH III
WILAYAH KERJA PROVINSI SUMATERA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

KONSERVASI RUMAH GADANG

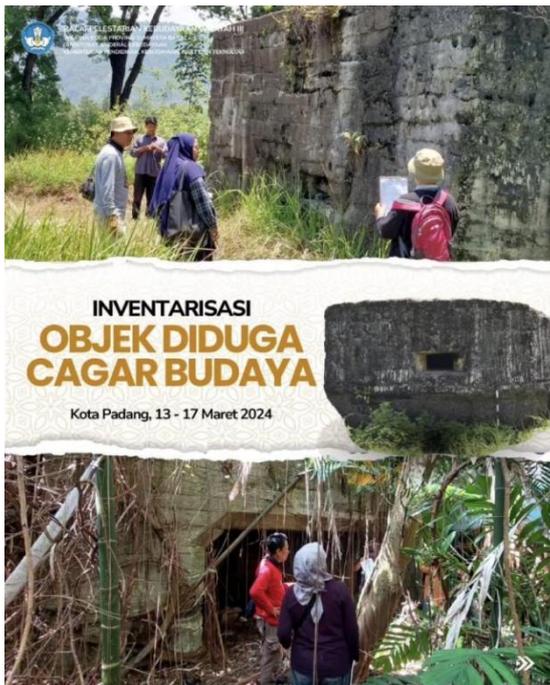
Di Perkampungan Adat Padang Rauh
Kabupaten Sijunjung

**DI WILAYAH KERJA
BPK WILAYAH III TAHUN 2024
(KAB. SIJUNJUNG)**
29 April - 4 Mei 2024

PEMBERSIHAN & PENGAWETAN MENGGUNAKAN TEMBAKAU DAN CENGKEH



LAPORAN
KINERJA
2024





BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH III
WILAYAH KERJA PROVINSI SUMATERA BARAT
DIREKTORAT BUDAYA, BUDIDAYA
KEHUTANAN, POKOKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

OBSERVASI KETERAWATAN CAGAR BUDAYA

DI WILAYAH KERJA
BPK WILAYAH III TAHUN 2024
(KOTA BUKITTINGGI, KAB. SIJUNJUNG, KAB. PASAMAN)
19- 22 FEBRUARI 2024

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa kunjungan lapangan yang disertai dengan pengamatan/observasi untuk mendapat data-data terkait kondisi riil sasaran kegiatan. Secara khusus observasi ini meliputi kerusakan/pelapukan, penyebab kerusakan/pelapukan, serta rekomendasi pelestarian berdasarkan analisis/evaluasi tim pelaksana kegiatan.

Observasi Keterawatan Cagar budaya
Situs Cagar Budaya Rumah Gadang
Kawasan Perkam: Jumpang Adat
Nagari Sijunjung

BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH III
WILAYAH KERJA PROVINSI SUMATERA BARAT
DIREKTORAT BUDAYA, BUDIDAYA
KEHUTANAN, POKOKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

INVENTARISASI OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Kabupaten Solok, 27 Februari - 1 Maret 2024

Beberapa peralatan pendukung OPK
di Kecamatan X Koto Singkarak

LAPORAN
KINERJA
2024



Berikut perbandingan data kinerja IKK Jumlah CB dan WBTB yang Dilindungi pada tahun 2023 dan 2024 serta perbandingan dengan target akhir Renstra:

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir Renstra	% Capaian Akhir Renstra
2023	42	80	190%	81	98.8%
2024	81	81	100%	81	100%

Dapat dilihat pada tabel di atas, jumlah capaian IKK Jumlah CB dan WBTB yang dilindungi pada tahun 2024 sebesar 100% dan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra capaian IKK Jumlah CB dan WBTB yang dilindungi adalah 100%.

Realisasi Anggaran

Berikut rincian penyerapan anggaran pada IKK Jumlah CB dan WBTB yang Dilindungi tahun 2024:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi	% Daya Serap
Meningkatnya jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi	6.333.688.000	5.436.860.753	85.84

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp896.827.247,- yang merupakan akumulasi dari sisa anggaran pekerjaan kontraktual, belanja barang, belanja honorarium, dan belanja perjalanan dinas yang tidak bisa dioptimalkan lagi karena keterbatasan waktu dan tenaga pelaksana.

SP. Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif

IKP Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni

SK Meningkatnya Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola

Ketercapaian Sasaran Program Meningkatnya Jumlah Fasilitasi Kebudayaan yang Dikelola ditandai dengan peningkatan jumlah bantuan yang diserahkan kepada perorangan/ kelompok masyarakat dengan ketentuan sesuai yang diatur oleh Permendikbudristek Nomor 5 tahun 2024.

Sasaran Program ke tiga ini dilaksanakan oleh urusan umum di lingkungan BPK Wilayah III. Ketercapaian Sasaran Program tersebut didukung oleh satu indikator kinerja kegiatan. Adapun tingkat ketercapaian dari indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

IKK Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola

Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang dikelola Ditjen Kebudayaan dalam hal ini meliputi bantuan pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang dikelola Sekretariat Ditjen Kebudayaan dan bantuan pemerintah Fasilitasi dan Kemitraan Kebudayaan yang dikelola Balai Pelestarian Kebudayaan.

Fasilitasi Bidang Kebudayaan merupakan salah satu upaya Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan strategi pemajuan kebudayaan. Fasilitasi Bidang Kebudayaan adalah kegiatan pendukung yang bersifat stimulus yang diberikan kepada perseorangan/ kelompok, bersifat non-fisik dan non-komersil serta dapat diapresiasi masyarakat dan pemangku kepentingan (stake holder) secara luas.

Bantuan Pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada perseorangan, komunitas budaya, dan lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan dalam rangka melakukan dokumentasi karya/pengetahuan maestro, penciptaan karya kreatif inovatif, dan pendayagunaan ruang publik untuk pemajuan kebudayaan.

Fasilitasi dan Kemitraan Nilai Budaya adalah kegiatan pemberian bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada Setiap Orang dalam rangka pemajuan kebudayaan. Setiap Orang adalah orang perseorangan, komunitas budaya, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan pelestarian nilai budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan. Balai Pelestarian Kebudayaan adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

Metode perhitungan capaian kinerja IKK Jumlah Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang Dikelola adalah sebagai berikut:

Metode Penghitungan	:	Metode perhitungan dengan menjumlahkan penerima fasilitasi bidang kebudayaan dan fasilitasi pelestarian Kebudayaan.
Satuan	:	Orang/Kelompok Masyarakat
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Kelompok Kerja Pelaksana	:	Kelompok Kerja Tata Usaha
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Pemberian Bantuan Fasilitasi Bidang Kebudayaan ini merupakan program lanjutan dari tugas dan fungsi BPNB dahulunya, yang kemudian disebabkan re-

organisasi tugas ini menjadi bagian dari BPK Wilayah III sejak tahun 2023 sampai dengan 2024.

Pemberian bantuan ini, merujuk kepada Juknis Perdirjen Kebudayaan No. 1 Tahun 2024. Tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah Fasilitas Pemajuan Kebudayaan Tahun 2024 yaitu untuk:

- a. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
- b. Menghidupkan kembali objek pemajuan kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
- c. Menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan;
- d. Menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan;
- e. Mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi penerus berikutnya.

Pada tahun 2024 ini, BPK Wilayah III telah memverifikasi sebanyak 49 proposal yang masuk untuk bantuan fasilitasi. Hanya 39 proposal yang memenuhi persyaratan dan disetujui untuk diberikan bantuan fasilitasi bidang kebudayaan baik perorangan maupun kelompok.

Berikut perbandingan penerima bantuan FPK tahun 2023 dan 2024:

Tahun	Perorangan	Kelompok
2023	22	16
2024	22	17

Dengan melihat tabel di atas, terdapat peningkatan jumlah proposal yang diverifikasi oleh tim verifikator BPK Wilayah III tahun 2024 yaitu menjadi 17 kelompok masyarakat dan 22 perorangan dengan jumlah keseluruhan 39 penerima bantuan FPK.

Capaian kinerja IKK Jumlah Fasilitas Kebudayaan yang Dikelola tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Dokumen	Target	Realisasi	%
DIPA	25	39	156%
PK	39	39	100%

Dapat dilihat pada tabel di atas, capaian kinerja IKK Jumlah Fasilitas Kebudayaan yang Dikelola pada tahun 2024 adalah 100% jika dibandingkan dengan target dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024. Sedangkan jika dibandingkan dengan target yang tercantum pada dokumen DIPA tahun 2024

LAPORAN
KINERJA
2024

capaian kinerja IKK Jumlah Fasilitas Kebudayaan yang Dikelola tahun 2024 adalah 156% atau 25 orang/ kelompok masyarakat dengan target 25 orang/kelompok masyarakat.

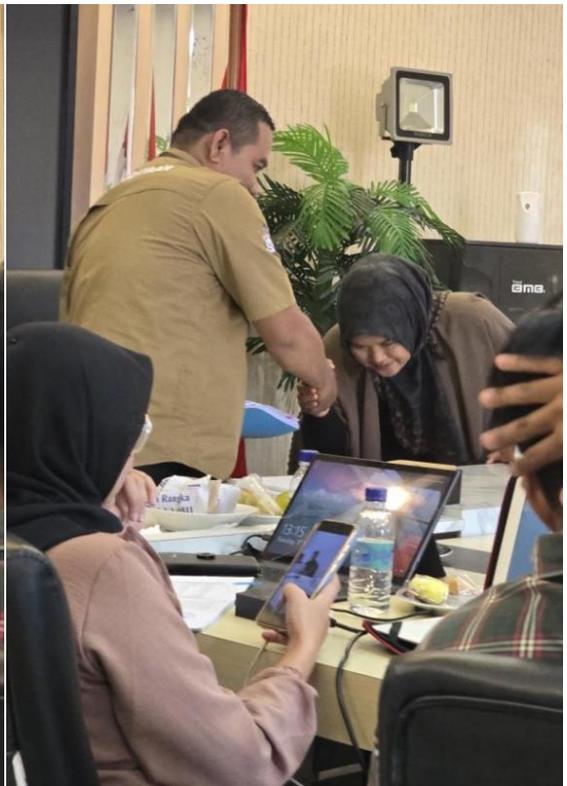
Berikut dokumentasi tahapan kegiatan dalam pencapaian IKK Jumlah Fasilitas Kebudayaan yang Dikelola pada tahun 2024:



LAPORAN
KINERJA
2024



LAPORAN
KINERJA
2024



LAPORAN
KINERJA
2024



LAPORAN
KINERJA
2024



KINERJA**2024**

Berikut perbandingan data kinerja IKK Jumlah Fasilitas Kebudayaan yang Dikelola pada tahun 2023 dan 2024 serta perbandingan dengan target akhir Renstra:

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir Renstra	% Capaian Akhir Renstra
2023	20	38	190%	39	97.4%
2024	39	39	100%	39	100%

Dengan melihat grafik di atas, terdapat peningkatan target dan capaian pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Capaian kinerja IKK Jumlah Fasilitas Kebudayaan yang Dikelola pada tahun 2024 adalah 100% sebesar 39 orang/kelompok masyarakat. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra yaitu 39 orang/kelompok masyarakat maka capaian kinerja IKK Jumlah Fasilitas Kebudayaan yang Dikelola adalah 100%.

Program/kegiatan terkait yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Melakukan rapat internal tim FPK untuk menyusun jadwal mulai dari pengumuman pengajuan proposal sampai dengan penyerahan laporan final kegiatan penerima bantuan FPK 2024
2. Pengumuman jadwal penerima bantuan FPK 2024
3. Verifikasi proposal yang masuk
4. Verifikasi lapangan calon penerima bantuan FPK 2024
5. Sosialisasi dan penandatanganan kesepakatan dengan penerima FPK 2024
6. Monitoring lapangan terkait pelaksanaan kegiatan penerima FPK 2024
7. Pengiriman laporan kegiatan final
8. Rapat internal terkait kelengkapan semua dokumen penerima bantuan FPK 2024

Dengan terlaksananya tahapan-tahapan di atas, maka capaian kinerja IKK Jumlah Fasilitas Kebudayaan yang Dikelola dapat tercapai dan terlaksana sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Realisasi Anggaran

Berikut rincian penyerapan anggaran pada IKK Jumlah Fasilitas Kebudayaan yang Dikelola tahun 2024:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi	% Daya Serap
Meningkatnya jumlah fasilitasi kebudayaan yang dikelola	Jumlah jumlah fasilitasi kebudayaan yang dikelola	581.050.000	577.235.000	99.34

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.815.000,- yang merupakan akumulasi dari sisa belanja perjalanan dinas.

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya Tata Kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III

Penerapan Akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh satker dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan Evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Indikator Kegiatan 4.1

Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III minimal BB

Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal "BB" adalah untuk mengukur jumlah satker di lingkungan Kemendikbudristek yang penyelenggaraan SAKIP telah mencapai predikat minimal "BB", sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Biro Perencanaan.

Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai BB adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP > 70 – 80, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel.

Model perhitungan yang digunakan dalam penilaian ketercapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah:

Nilai SAKIP = Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 - 90	A	Memuaskan
> 70 - 80	BB	Sangat Baik
> 60 - 70	B	Baik
> 50 - 60	CC	Cukup (Memadai)
> 30 - 50	C	Kurang
0 - 30	D	Sangat Kurang

Pada tahun 2024, BPK Wilayah III dapat memenuhi data dukung penilaian evaluasi SAKIP yang terdiri dari:

1. Dokumen Perencanaan Kinerja
2. Dokumen Pengukuran Kinerja
3. Dokumen Pelaporan Kinerja
4. Dokumen Evaluasi Kinerja
5. Dokumen Pencapaian Kinerja

Dengan demikian, berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi SPASIKITA, nilai SAKIP BPK Wilayah III adalah 75.45 dengan kategori BB. Dengan kata lain, BPK Wilayah III berhasil mencapai target yang ada pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024 dengan realisasi 100%. Sedangkan capaian kinerja SAKIP pada tahun 2023 tidak dinilai karena terjadi perubahan SOTK sehingga capaian kinerja tahun 2024 tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, capaian kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan target akhir renstra adalah tercapai 100%.

Capaian kinerja IKK Predikat SAKIP BPK Wilayah III minimal BB tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Dokumen	Target	Realisasi	%
PK	BB	BB	100%

Program/ kegiatan pendukung untuk indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Layanan BMN
 - a. Penyusunan Laporan BMN
2. Layanan Umum
 - a. Penyusunan Program, Anggaran, dan Pelaporan
 - b. Pengelolaan Administrasi Keuangan
 - c. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
 - d. Peningkatan Kapasitas SDM
 - e. Penilaian Kinerja Juru Pelihara PNS dan Non-PNS
 - f. Pengelolaan Administrasi BMN

Capaian Predikat SAKIP tahun 2024 tidak bisa dibandingkan dengan capaian predikat SAKIP tahun 2023, karena pada tahun 2023, belum dilakukan evaluasi SAKIP pada BPK Wilayah III yang disebabkan oleh perubahan struktur organisasi (reorganisasi). Berikut data kinerja IKK Predikat SAKIP BPK Wilayah III minimal BB pada tahun 2023 dan 2024 serta perbandingan dengan target akhir Renstra:

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir Renstra	% Capaian Akhir Renstra
2023	-	-	-	-	-
2024	BB	BB	100%	BB	100%

Indikator Kegiatan 4.2

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III minimal 93

Indikator kinerja kegiatan ke dua dari Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola BPK Wilayah III, yaitu: Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAK/L BPK Wilayah III minimal 93.

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran satker yang merupakan nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran K/L, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.

Metode perhitungan dalam menghitung ketercapaian target indikator kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran (NKA)} = (50\% \times \text{Nilai EKA}) + (50\% \times \text{Nilai IKPA})$$

Keterangan:

Nilai EKA diambil dari aplikasi SPASIKITA/ SMART DJA

Nilai IKPA diambil dari aplikasi OMSPAN

Capaian kinerja IKK NKA atas Pelaksanaan RKAK/L BPK Wilayah III minimal 93 tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Dokumen	Target	Realisasi	%
PK	93	95.7	102.9%

Berdasarkan tabel di atas, BPK Wilayah III dapat memenuhi indikator penilaian EKA dan IKPA, sebagai berikut:

Indikator EKA terdiri dari:

- a. Efektivitas:
 1. Capaian Rincian Output : 100
- b. Efisiensi:
 2. Penggunaan SBK : 100
 3. Efisiensi SBK : 100

Indikator IKPA terdiri dari:

- a. Kualitas Perencanaan
 1. Revisi DIPA : 100
 2. Deviasi Halaman III DIPA : 78.27
- b. Kualitas Pelaksanaan Anggaran
 3. Penyerapan Anggaran : 79.85

KINERJA

2024

4. Belanja Kontraktual : 84.00
5. Penyelesaian Tagihan : 100
6. Pengelolaan UP dan TUP : 94.91
7. Dispensasi SPM : 0
- c. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
 8. Capaian Output : 100

Dengan demikian NKA atas pelaksanaan RKAK/L BPK Wilayah III tahun 2024 dengan menggunakan metode perhitungan NKA adalah 95.7 atau sebesar 102,9%, dengan rincian sebagai berikut:

Nilai EKA : 100

Nilai IKPA : 91,39

$NKA = (50\% \times 100) + (50\% \times 91,39) = 95,7$

Berikut perbandingan capaian kinerja IKK NKA atas pelaksanaan RKAK/L BPK Wilayah III tahun 2024 dengan tahun 2023:

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir Renstra	% Capaian Akhir Renstra
2023	91	92.88	102%	93	99.9%
2024	93	95.7	102.9%	93	102.9%

Berikut merupakan kegiatan pendukung ketercapaian IKK NKA atas pelaksanaan RKAK/L BPK Wilayah III tahun 2024 minimal 93:

1. Layanan Perkantoran
 - a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
 - b. Pembayaran Honorarium Terkait Operasional Perkantoran
 - c. Keperluan Rutin Perkantoran
 - d. Langganan Daya dan Jasa
 - e. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
 - f. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
 - g. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
2. Layanan Sarana Internal
 - a. Peralatan Pemetaan, Pemugaran, dan Laboratorium
3. Layanan Prasarana Internal
 - a. Renovasi Gedung Serbaguna BPK Wilayah III

Realisasi Anggaran

Berikut rincian penyerapan anggaran pada IKK Predikat SAKIP BPK Wilayah III minimal BB dan IKK NKA atas Pelaksanaan RKAK/L BPK Wilayah III tahun 2024:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi	% Daya Serap
Meningkatnya Tata Kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III minimal BB	14.795.144.000	14.441.085.789	97.61
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III			

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp354.058.211,- yang merupakan akumulasi dari sisa anggaran belanja barang, belanja honorarium, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas yang tidak bisa dioptimalkan lagi karena keterbatasan waktu.

Target IKK ini dapat dicapai karena kerja sama seluruh pihak dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan anggaran dan melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk peningkatan kinerja anggaran tahun berikutnya.

Adapun kendala dalam pencapaian target indikator kinerja kegiatan ini adalah dalam hal pemenuhan indikator penilaian IKPA yang terdiri dari 8 indikator, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini antara lain:

1. Masih terdapat Deviasi Halaman III DIPA;
2. Penyerapan anggaran yang harusnya masih bisa ditingkatkan lagi;
3. Pengajuan SPM yang ditolak; dan
4. Pengelolaan UP dan TUP yang masih kurang sesuai dengan rencana.

LAPORAN
KINERJA
2024

Nilai IKPA per Des 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BATUSANGKAR

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	011	023	526051	BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH III	Nilai	100.00	78.27	79.85	84.00	100.00	94.83	100.00	90.59	100%	0.00	90.59
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.74	15.97	8.40	10.00	9.48	25.00				
					Nilai Aspek	89.14		89.67				100.00				

Sumber: Aplikasi OMSPAN tgl 21 Januari 2025

Hambatan dan Langkah Antisipasi

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan, antara lain:

SK 1. Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah

IKK 2.1 Jumlah event kebudayaan daerah

1. Kegiatan event kebudayaan/ giat ini sebagian besar merupakan kegiatan pendukung yang melibatkan pihak di luar BPK Wilayah III. Sehingga untuk penyusunan jadwal mengikuti jadwal pelaksanaan event pemerintah daerah bersangkutan yang rata-rata pelaksanaannya dimulai pada triwulan ke II.

SK 2. Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi

IKK 1.1 Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi

1. Kegiatan kontraktual yang direncanakan dijadwalkan pada Triwulan kedua baru bisa dilaksanakan pada triwulan ke III disebabkan beberapa kendala seperti blokir anggaran belanja modal
2. Masih kurangnya data dukung untuk kontraktual kegiatan fisik, sehingga masih membutuhkan waktu untuk melakukan studi teknisnya sebelum dilakukan kegiatan fisiknya.
3. Penunjukan PPK tipe C yang sedikit membutuhkan waktu karena pada BPK Wilayah III belum terdapat PPK tipe C sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Proses penunjukan pokja pemilihan menjadi tanggungjawab Biro Umum Jakarta, dan membutuhkan waktu dalam penunjukannya
5. Proses pemaketan kontraktual dan penunjukan penyedia pada aplikasi LPSE mengalami kendala karena serangan cyber pada server PDN
6. Kegiatan sudah terlaksana sesuai jadwal yang ditetapkan, sebagian kegiatan fisik kontraktual sudah dalam proses penyusunan KAK kegiatan dan akan selesai pada bulan November

SK 3. Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola

IKK 3.1 Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola

1. Juknis terkait pemberian fasilitasi kebudayaan diterbitkan pada bulan Februari 2024 dan diterima tim fasilitasi pada bulan Maret 2024. Sehingga pelaksanaan kegiatan dimulai pada bulan Mei.
2. Pelaporan dari penerima FPK yang sedikit terlambat disebabkan tertundanya pelaksanaan kegiatan karena adanya pelarangan penampilan seni budaya selama masa kampanye dan pilkada.

KINERJA

2024

SK 4. Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Kabupaten Tanah Datar

IKK 4.1 Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Kabupaten Tanah Datar

1. Notula rapat masih belum tersusun dengan baik, namun bisa diselesaikan.
2. Terdapat beberapa dokumen yang belum bisa dilengkapi karena memang belum bisa dilaksanakan.

SK 4. Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Kabupaten Tanah Datar

IKK 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Kabupaten Tanah Datar

1. Nilai IKPA belum 100 disebabkan nilai pengelolaan UP TUP masih belum maksimal 100% karena belum maksimalnya penyerapan belanja anggaran pada bulan Februari, yaitu 20 hari kalender hanya terserap 60,68% yang harusnya jika 20 hari kalender idealnya minimal 66,7%
2. Revisi RENSTRA 2023-2024 masih dalam proses penyusunan setelah dilakukan reviu RENSTRA karena BPK Wilayah III merupakan satker baru.
3. Penyerapan Anggaran yang masih rendah disebabkan kegiatan fisik kontraktual yang tertunda pelaksanaan dan pembayarannya karena terganggunya aplikasi LPSE dan server PDN
4. Pengelolaan UP TUP yang masih belum 100% disebabkan adanya pengambalian belanja 52 sebesar Rp2,810,296
5. Terdapat deviasi halaman III DIPA yg disebabkan pengajuan SPM di akhir bulan dan terbitnya SPPD pada bulan berikutnya; Penyerapan anggaran yang masih rendah disebabkan belanja kontraktual yang masih dalam proses dan akan dibayarkan per termin sampai dengan Desember 2024; dan Penyelesaian UP TUP yang masih ada pengembalian belanja di 52.
6. Terdapat dispensasi SPM karena salah pencatatan nomor rekening suplier sehingga mengurangi nilai IKPA.

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

SK 1. Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah

IKK 2.1 Jumlah event kebudayaan daerah

1. Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam kegiatan agar jadwal pelaksanaan bisa dipastikan, jikapun ada perubahan bisa segera disesuaikan dan menyesuaikan dengan kalender event daerah.

KINERJA

2024

SK 2. Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi

IKK 1.1 Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi

1. Melakukan penjadwalan ulang terkait kegiatan kontraktual
2. Mempercepat proses tender untuk renovasi gedung
3. Setelah PPK ditunjuk dan pokja pemilihan dibentuk, melakukan koordinasi intens untuk percepatan pelaksanaan kegiatan
4. Menugaskan pegawai yang dinilai kompeten untuk mengikuti diklat PPK tipe C
5. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan kontraktual
6. Melakukan koordinasi intens dengan pihak penyedia/ kontraktual terkait pelaksanaan kegiatan fisik/ kontraktual
7. Melakukan koordinasi dengan Biro Umum/UKPBJ Jakarta terkait permasalahan LPSE dan server PDN
8. Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dilakukan perubahan lokus kegiatan agar tetap bisa dilaksanakan.

SK 3. Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola

IKK 3.1 Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola

1. Setelah juknis diterima tim segera melakukan rapat awal terkait proses penerima bantuan fasilitasi dan penentuan jadwal batas akhir, kemudian diumumkan pada kanal sosial media BPK Wilayah III agar informasi segera tersebar luas.
2. Percepatan pelaksanaan verifikasi lapangan dan melakukan rapat kesepakatan keputusan hasil penerima bantuan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan memperhatikan Juknis sebagai dasar pemberian bantuan.
4. Melakukan Monitoring pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan kegiatan agar tetap selesai di batas waktu yang telah ditentukan.

SK 4. Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Kabupaten Tanah Datar

IKK 4.1 Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Kabupaten Tanah Datar

1. Tim SAKIP melakukan rapat untuk pembagian tugas terkait pengumpulan dokumen penilaian SAKIP
2. Melakukan rapat terkait kelengkapan dokumen SAKIP dengan Pimpinan, Tim SPI dan TIM SAKIP

LAPORAN

KINERJA

2024

3. Melakukan pendampingan terkait evaluasi SAKIP dengan Setditjen dan Biro Perencanaan sebelum dilakukannya evaluasi oleh Itjen
4. Melengkapi dokumen yang diperlukan dengan melaksanakan kegiatan yang diperlukan agar dokumen tersebut bisa dilengkapi.

SK 4. Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Kabupaten Tanah Datar

IKK 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Kabupaten Tanah Datar

1. Melakukan perbaikan dengan melakukan pengelolaan UP TUP lebih baik dan memperhatikan Rencana Penarikan Dana Hal III DIPA
2. Melakukan evaluasi kinerja triwulan sehingga bisa mencari solusi atas permasalahan
3. Melakukan revisi halaman III DIPA dan mempercepat belanja anggaran dan pelaksanaan kegiatan serta memperhatikan deviasi antara rencana dan realisasi di Halaman III DIPA.
4. Memperhatikan pengajuan SPM agar tidak terdapat keterlambatan dan kesalahan lagi.

B. Realisasi Program/ Agenda Prioritas

Berikut merupakan target dan realisasi program taging prioritas nasional BPK Wilayah III pada tahun 2024:

TARGET DAN REALISASI TAGING PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH III TA 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output	Target	Realisasi	Alokasi Biaya (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
Meningkatnya Jumlah Event Kebudayaan Daerah	Jumlah Event Kebudayaan Daerah	[6963] Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya	[6963.PEG] Konferensi dan Event	[6963.PEG.001] Giat Warisan Budaya	12	32	3.461.326.000	3.320.947.557
Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilindungi	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilindungi		[6963.QMA] Data dan Informasi Publik	[6963.QMA.001] Data dan Informasi Warisan Budaya	11	18	959.492.000	797.080.163
			[6963.RDN] OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	[6963.RDN.001] Cagar Budaya, ODCB yang Dilindungi	18	47	4.801.091.000	4.119.571.872
Meningkatnya Jumlah Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang Dikelola	Jumlah Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang Dikelola		[6963.QDD] Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	[6963.QDD.001] Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya	25	39	581.050.000	577.235.000

C. Realisasi Anggaran

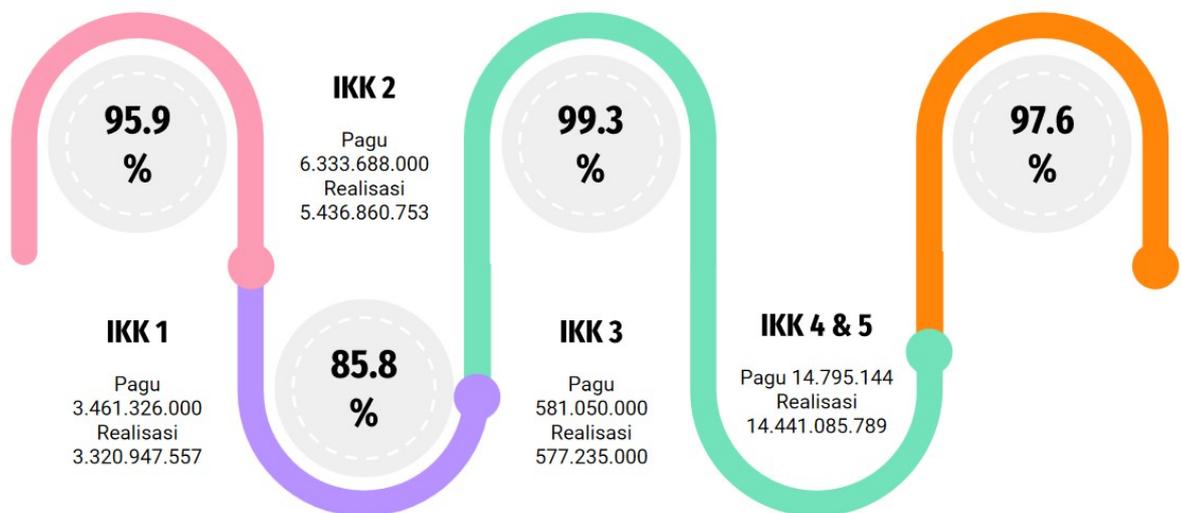
1. Capaian Anggaran

Pagu anggaran Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III dalam DIPA Tahun 2024 sebesar Rp20.075.586.000,-. Dari pagu anggaran tersebut

berhasil direalisasikan sebesar Rp18.811.997.137,- dengan persentase daya serap sebesar 93.71% dengan anggaran Blokir berjumlah Rp1.000.000.000,- di akun belanja perjalanan dinas. Pagu sebesar tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja.

Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing indikator kinerja kegiatan.

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN TA 2024



2. Efisiensi Anggaran

1. Jenis Efisiensi (*automatic adjustment* atau *refocusing*)

Pada tahun 2024 berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp1.000.000.000,-. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari *selfblocking* belanja perjalanan dinas tahun 2024.

2. Pemanfaatan Efisiensi Anggaran

Anggaran *selfblocking* tersebut dimanfaatkan sebagai upaya efisiensi belanja negara dalam rangka mendukung pengelolaan anggaran yang lebih efektif sesuai amanat SE Kementerian Keuangan nomor S-1023/MK.02/2024 yang dikeluarkan pada 7 November 2024 dengan tetap menjaga ketercapaian program-program prioritas.

3. Pemanfaatan Efisiensi Anggaran

Anggaran hasil efisiensi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas seperti kegiatan Seminar Pelestarian Warisan

Budaya yang melibatkan seluruh komunitas yang ada di Sumatera Barat; Penyusunan Dokumen Pemajuan Kebudayaan Desa yang merupakan kegiatan pendukung kegiatan Pemerintah Pusat, Fasilitasi Bidang Kebudayaan, dan Pemantauan dan Evaluasi Pelindungan Warisan Budaya di Provinsi Sumatera Barat yang nanti akan dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan pelestarian di masa yang akan datang.

D. Kinerja Lain-Lain

1. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan pada BPK Wilayah III adalah bagian dari upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi berfokus pada perbaikan layanan publik melalui digitalisasi dan penyederhanaan proses layanan. Adapun langkah-langkah kerja yang telah dilakukan pada BPK Wilayah III dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satker adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Komitmen Pimpinan dan Pegawai
 - Meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh pegawai tentang pentingnya reformasi birokrasi.
 - Mendorong kepemimpinan yang visioner, transparan, dan akuntabel.
2. Penyusunan dan Implementasi Program Kerja Reformasi Birokrasi
 - Menyusun rencana aksi reformasi birokrasi yang selaras dengan kebijakan nasional.
 - Menyusun strategi penyederhanaan proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.
3. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja
 - Menerapkan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang jelas dan terukur.
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pegawai dan organisasi.
 - Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - Mengembangkan inovasi pelayanan untuk mempermudah akses masyarakat.

- Menyusun dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Penataan dan Penguatan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pengembangan profesional.
 - Mendorong budaya kerja yang profesional, inovatif, dan berorientasi hasil.
 6. Penguatan Pengawasan dan Pencegahan Korupsi
 - Menerapkan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
 - Memastikan adanya mekanisme pengaduan masyarakat dan tindak lanjut terhadap laporan penyimpangan.
 - Meningkatkan pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
 7. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Digitalisasi
 - Mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan.
 - Mengembangkan sistem berbasis digital untuk mengurangi birokrasi yang berbelit.
 - Meningkatkan keamanan data dan sistem informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Melalui upaya ini, diharapkan agar birokrasi lebih efisien, berintegritas, dan mampu mendukung program-program pendidikan yang berdampak luas bagi masyarakat.

2. Informasi Capaian Kinerja Lainnya yang mendukung

Pada tahun 2024, belum terdapat capaian kinerja lainnya yang mendukung ketercapaian indikator kinerja.

3. Inovasi

Inovasi yang telah dilakukan untuk meningkatkan layanan baik internal maupun eksternal salah satunya adalah Peningkatan Layanan Pusat Informasi Cagar Budaya di Tanah Datar dan Pusat Informasi Matrilineal di Padang. Peningkatan layanan pusat informasi dapat melibatkan berbagai aspek untuk meningkatkan efisiensi, keterjangkauan, dan kepuasan pengguna.

Berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan layanan pusat informasi:

- a. **Teknologi Informasi:**
Implementasi sistem manajemen informasi yang canggih untuk mempermudah pengelolaan data dan informasi. Menambahkan media atraktif dan visualisasi menarik.
- b. **Peningkatan Aksesibilitas:**
Penggunaan berbagai saluran komunikasi seperti telepon, email, chat online, dan media sosial.
- c. **Analisis Data dan Statistik:**
Melibatkan umpan balik pengunjung dan melakukan survei kepuasan pengunjung.
- d. **Sistem Pelaporan:**
Implementasi sistem pelaporan yang efisien untuk melacak dan mengevaluasi kinerja pusat informasi setiap bulannya.
- e. **Penyediaan Informasi yang Jelas:**
Informasi yang diberikan oleh pusat informasi jelas, akurat, dan mudah dimengerti dan membuat panduan atau dokumentasi yang dapat diakses oleh pengguna.

Peningkatan layanan pusat informasi bukanlah tugas sekali jalan, tetapi merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan perhatian terus-menerus terhadap kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi.

Dampak dari adanya inovasi tersebut

Semakin mudah pengunjung mengakses informasi mengenai pelestarian warisan budaya. Pusat Informasi yang ada di Tanah Datar dan Padang, bisa dijadikan sarana edukasi untuk anak peserta didik agar lebih menarik dalam memahami peninggalan sejarah dan nilai budaya. Semakin meningkatnya permintaan kunjungan ke Gedung Pusat Informasi BPK Wilayah III. Dengan banyaknya kunjungan tersebut, BPK Wilayah III membentuk tim layanan pusat informasi yang bertugas menjaga/ mendampingi pengunjung yang datang ke Layanan Pusat Informasi baik di hari kerja maupun hari libur.

Dokumentasi terkait inovasi Layanan Pusat Informasi



LAPORAN
KINERJA
2024





4. Penghargaan

Pada Tahun 2024, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III belum ada mendapatkan penghargaan terkait kinerja, baik dari pihak internal maupun eksternal.

5. Program Crosscutting/ Collaborative

Program *crosscutting/collaborative* yang telah dilakukan:

Giat Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS)

Merupakan kegiatan aktivasi dan penguatan ekosistem Warisan Tambang Batu Bara Ombilin-Sawahlunto (WTBOS) beserta jalur kereta api di 7 kab/kota yang dilaluinya, yakni Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kab. Sijunjung, Kab. Tanah Datar, Kab. Padang Pariaman, Kab. Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Solok. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi jejaring untuk mendistribusikan informasi, pengetahuan, ekspresi seni, objek pemajuan kebudayaan, cagar budaya, yang terkait dengan WTBOS.

Pihak-pihak yang berkaitan pada program *crosscutting/collaborative*: Kegiatan yang bernama Galanggang Arang ini merupakan inisiatif kolaboratif antara Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan (Dit PPK), Direktorat Jenderal Kebudayaan, BPK Wilayah III, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah 7 Kabupaten/Kota bersama komunitas seni budaya, tokoh adat ninik-mamak dan masyarakat.

Peran satker dan pihak-pihak yang terkait pada program *crosscutting/collaborative*:

Instansi	Peran
Dit. PPK	Pencetus Kegiatan
Dirjen Kebudayaan	Penanggung jawab Kegiatan
BPK Wilayah III	Pelaksana Kegiatan
Pemerintah Provinsi	Pendukung Kegiatan
Pemerintah 7 Kab/ Kota	Pendukung Kegiatan

Dampak dari program *crosscutting/collaborative*:

Program *crosscutting* atau kolaboratif merujuk pada inisiatif atau proyek yang melibatkan kerjasama antara berbagai sektor atau pihak terkait yang berbeda. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan melalui integrasi perspektif dan keahlian dari berbagai bidang. Berikut beberapa dampak yang terjadi:

- a. Peningkatan Efisiensi:
Kolaborasi antar pemerintah atau *stakeholder* dapat menghasilkan peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan proyek atau program. Integrasi sumber daya dan pengetahuan dari berbagai pihak dapat mengurangi tumpang tindih dan meningkatkan pengelolaan sumber daya.
- b. Inovasi:
Kolaborasi melibatkan perpaduan berbagai perspektif dan keahlian. Ini dapat merangsang inovasi dan pengembangan solusi yang lebih efektif karena adanya pemikiran lintas sektor.
- c. Peningkatan Keterlibatan Pihak Terkait:
Melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan. Menciptakan dukungan lebih besar dan pemahaman yang lebih baik terhadap isu yang dihadapi.
- d. Pengelolaan Risiko yang Lebih Baik:
Dengan melibatkan berbagai pihak, program *crosscutting* dapat membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan lebih baik. Pemahaman yang lebih komprehensif tentang aspek-aspek yang berbeda dapat mengurangi risiko kesalahan atau kegagalan.
- e. Penyelesaian Masalah yang Kompleks:
Program *crosscutting* seringkali digunakan untuk menangani masalah-masalah yang kompleks dan multifaset. Melibatkan berbagai ahli dan pihak yang berbeda dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan solusi yang lebih efektif.
- f. Pengaruh pada Kebijakan Publik:
Kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan non-profit dapat memiliki dampak yang signifikan pada pengembangan kebijakan publik. Hasil dari program *crosscutting* dapat membentuk arah kebijakan yang lebih holistik.
- g. Peningkatan Kapasitas:
Melalui pertukaran pengetahuan dan keterampilan antar sektor, program kolaboratif dapat meningkatkan kapasitas organisasi dan individu terlibat.
- h. Pengaruh Jangka Panjang:
Dampak dari program kolaboratif dapat berlanjut jangka panjang, terutama jika tercipta fondasi kerjasama yang kuat dan berkelanjutan antara pihak-pihak yang terlibat.

Data dukung program *crosscutting/collaborative*:



Foto. Pembacaan Kesepakatan WT BOS

KESEPAKATAN GALANGGANG ARANG

Kami mewakili Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Nagari, Kerapatan Adat Nagari dan Bundo Kandung dari nagari-nagari yang terletak di kawasan dan jalur Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS), yang meliputi tujuh wilayah Kabupaten Kota di Sumatera Barat, yakni Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang, setelah melakukan dialog menyatakan:

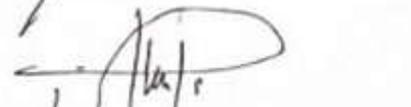
1. Bahwa Warisan Budaya Minangkabau merupakan Objek Pemajuan Kebudayaan yang sangat penting untuk tetap dilindungi, dilestarikan dan dikembangkan untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara serta kesejahteraan Anak Nagari.
2. Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto, yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Dunia (World Heritage), termasuk Warisan Budaya Minangkabau atau Sumatera Barat yang sangat penting untuk dilindungi dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian warisan budaya.
3. Penguatan Ekosistem Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) yang mengusung tema Galanggang Arang: Anak Nagari ikut Merayakan WTBOS sebagai Warisan Dunia, kami bersepakat dan mendukung serta berpartisipasi sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki Nagari masing-masing.
4. Mendorong berbagai pihak terkait dalam aktivasi dan penguatan ekosistem WTBOS melalui sinergitas anak Nagari dan kelembagaan secara konsisten dan berkelanjutan.

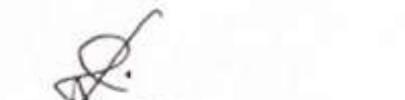
Demikian Kesepakatan Galanggang Arang ini kami buat, dengan tujuan untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan anak nagari Minangkabau. Terima kasih.

Padang, 19 Oktober 2023

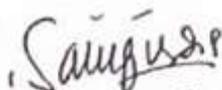
Kami yang bersepakat:


Drs. Aji Muanis Ichkayo
(Sawahlunto)


IRELI SOFA-SH DT. TAN MANGALU
(Padang Panjang)


KAMRIL Dt. AJ. KUBUNO G.
(Kota Solok)


ERMALISYAH Dt. RANGKAYO BAK
(Padang Pariaman)

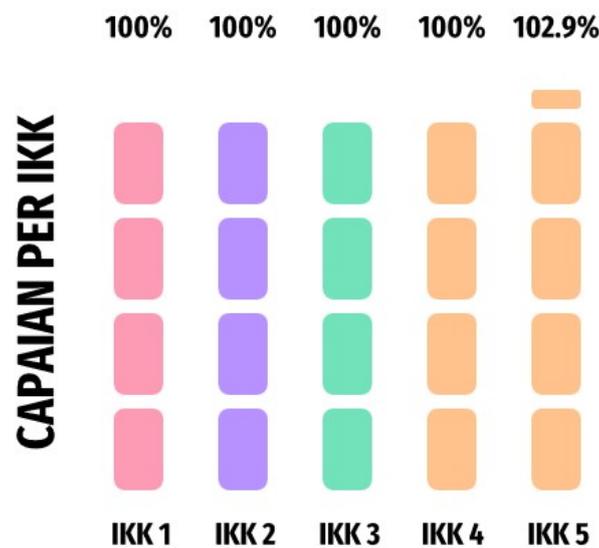

SAINGUS P
(Kab. Solok)


BERANG YOHENDI
(Tanah Datar)


Saifudin
(Padang)

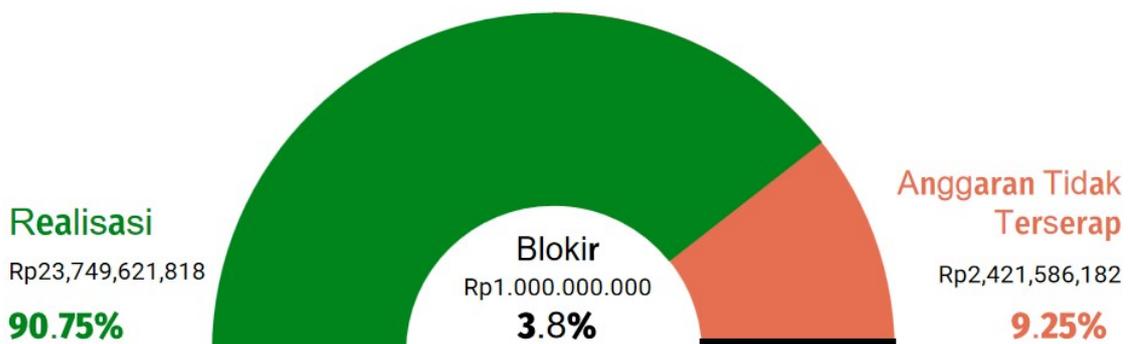
BAB IV Penutup

Selama Tahun 2024, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja kegiatan dan kinerja keuangan selama Tahun 2024:



Kinerja BPK Wilayah III Tahun 2024, secara keseluruhan dikatakan berhasil dengan capaian rata-rata sebesar 100% dari lima indikator kinerja kegiatan dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Keberhasilan capaian kinerja ini juga didukung oleh kinerja keuangan dengan realisasi anggaran Rp23,749,621,818,- dengan persentase daya serap sebesar 90.75% dari jumlah pagu Rp26,171,208,000,- termasuk anggaran blokir Rp1.000.000.000,-

DAYA SERAP ANGGARAN 2024



KINERJA

2024

Rekomendasi Pimpinan atas Kendala/Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target tahun 2024, sebagai berikut:

1. Rapat evaluasi triwulan tetap dilakukan agar bisa melihat kendala dan permasalahan yang ada dan kita carikan solusinya bersama dengan cepat dan tepat;
2. Lakukan koordinasi intensif dengan Stakeholder agar kegiatan yang melibatkan pihak luar bisa berjalan sesuai rencana;
3. Memperhatikan juknis pemberian bantuan FPK tahun 2024 untuk menghindari kesalahan administrasi dalam penyaluran bantuan serta memantau laporan kegiatan final seluruh penerima bantuan FPK agar disampaikan tepat waktu;
4. Melengkapi dokumen pendukung SAKIP yang masih kurang dan menjadikan perhatian di masa yang akan datang;
5. Memperhatikan RPD Halaman III DIPA dan jadwal yang telah disusun dalam pelaksanaan kegiatan untuk menghindari deviasi di atas 5%;
6. Lakukan pemutakhiran RPD halaman III DIPA sesuai serapan anggaran dengan memperhatikan jadwal revisi yang telah ditentukan;
7. Pengelola keuangan agar memperhatikan aturan keuangan yang berlaku terutama untuk indikator penilaian IKPA agar nilai kinerja anggaran kita maksimal;
8. Agar memaksimalkan nilai penyelesaian UP TUP dengan memperhatikan realisasi belanja anggaran;
9. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan Belanja anggaran serta melakukan optimalisasi sisa anggaran kegiatan untuk kegiatan fisik kontraktual.

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Peningkatan kualitas/ pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Percepatan pelaksanaan kegiatan kontraktual/ lelang;
3. Pengawasan Internal dan Evaluasi/ pemberdayaan SPI perlu ditingkatkan;
4. Pemenuhan kualitas untuk peningkatan nilai SAKIP dan NKA.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain:

1. Peningkatan Nilai Kinerja Anggaran EKA dan IKPA dengan cara melakukan perbaikan berkelanjutan atas Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi program dan kegiatan untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja yang diperjanjikan;
2. Pelibatan/ pendampingan pimpinan dalam rangka pelaksanaan evaluasi mandiri untuk pemberian Reward and Punishment pegawai;
3. Melakukan pengawasan dan evaluasi internal dengan memberdayakan SPI;

4. Peningkatan/ pengembangan kualitas/ kapasitas SDM melalui diklat/ pelatihan.

Seiring dengan selesainya periode Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2020-2024, dapat dikatakan bahwa BPK Wilayah III telah melaksanakan program kegiatan berdasarkan target/sasaran kinerja yang ditetapkan dengan optimal/tidak optimal. Selanjut, kita akan memasuki periode arah dan kebijakan baru, yaitu Renstra Tahun 2025-2029, dimana mengacu kepada Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Dengan terbitnya SOTK Kementerian Kebudayaan pada akhir tahun 2024, maka akan ada Arah kebijakan baru yang tentunya akan memiliki program, target, sasaran kinerja dan anggaran yang baru dan mendukung peningkatan kualitas bidang kebudayaan. Untuk saat ini, BPK Wilayah III belum bisa memberikan gambaran arah dan kebijakan bidang kebudayaan untuk periode berikutnya. Namun, arah dan kebijakan tersebut tidak akan beranjak dari pelestarian warisan budaya di Sumatra Barat khususnya.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Awal



**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III
Dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Undri
Jabatan : Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hilmar Farid
Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 15 Februari 2024

Direktur Jenderal Kebudayaan,

Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan
Wilayah III,



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI



LAPORAN
KINERJA
 2024

Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1.0] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	81
[2.0] Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah	[2.1] Jumlah event kebudayaan daerah	32
[3.0] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[3.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	39
[4.0] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Kabupaten Tanah Datar	[4.1] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Kabupaten Tanah Datar	BB
[4.0] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Kabupaten Tanah Datar	[4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Kabupaten Tanah Datar	93

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 15.467.723.000,-
2.	6963	Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya	Rp. 11.314.285.000,-
Total Anggaran			Rp. 26.782.008.000,-

Jakarta, 15 Februari 2024

Direktur Jenderal Kebudayaan,

Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan
 Wilayah III,



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE



2. Perjanjian Kinerja Akhir



**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan
Wilayah III
Dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Undri
Jabatan : Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hilmar Farid
Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Tanah Datar, 13 Desember 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kebudayaan
Hilmar Farid

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan
Wilayah III
Undri



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.



LAPORAN
KINERJA
2024

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	Unit	81
[SK 2] Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah	[IKK 2.1] Jumlah event kebudayaan daerah	Kegiatan	32
[SK 3] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 3.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	Orang/Kelompok Masyarakat	39
[SK 4] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Kabupaten Tanah Datar	[IKK 4.1] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Kabupaten Tanah Datar	Predikat	BB
	[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Kabupaten Tanah Datar	Nilai	93

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp 14.856.923.000
2	6963	Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya	Rp 11.314.285.000
Total Anggaran			Rp 26.171.208.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Jenderal Kebudayaan
 Hilmar Farid

Tanah Datar, 13 Desember 2024


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan
 Wilayah III
 Undri



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



3. Pengukuran Kinerja



**Laporan Kinerja Triwulan I
Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III
Tahun 2024**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III selama Triwulan I Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan I

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	81	Unit	0	28
2.	[SK 2.0] Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah	[IKK 2.1] Jumlah event kebudayaan daerah	32	Kegiatan	0	0
3.	[SK 3.0] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 3.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	39	Orang/ Kelompok Masyarakat	0	0
4.	[SK 4.0] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Kabupaten Tanah Datar	[IKK 4.1] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Kabupaten Tanah Datar	BB	Predikat	-	-
5.	[SK 4.0] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Kabupaten Tanah Datar	[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Kabupaten Tanah Datar	93	Nilai	0	0

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan I

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[526051.DH.6963.ABH.001] Naskah Pelestarian Warisan Budaya	Rekomendasi Kebijakan	12	0	12	608.605.000	10.680.000	597.925.000
[526051.DH.6963.PEG.001] Giat Warisan Budaya	Kegiatan	12	0	12	3.687.075.000	14.770.000	3.672.305.000
[526051.DH.6963.QDD.001] Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya	Kelompok Masyarakat	25	0	25	581.050.000	0	581.050.000
[526051.DH.6963.QMA.001] Data dan Informasi Warisan Budaya	layanan	11	6	5	976.785.000	117.460.219	859.324.781
[526051.DH.6963.RDN.001] Cagar Budaya ODCB dan OPK Yang Dilestarikan	unit	18	12	6	5.460.770.000	428.510.000	5.032.260.000
[526051.WA.5180.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	1	991.530.000	202.207.870	789.322.130
[526051.WA.5180.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	1	10.412.536.000	2.045.926.021	8.366.609.979
[526051.WA.5180.EBB.971] Layanan Prasarana Internal	Unit	1	0	1	4.063.657.000	0	4.063.657.000
Total					26.782.008.000	2.819.554.110	23.962.453.890

D. Rekomendasi Pimpinan

- Melihat capaian kinerja triwulan 1, sudah melebihi dari target triwulan 1 yang ditetapkan; pertahankan dan tetap lakukan percepatan belanja anggaran terutama belanja kontraktual yang dimulai pada triwulan ke 2 ini;
- Rapat evaluasi triwulan tetap dilakukan agar bisa melihat kendala dan permasalahan yang ada dan kita carikan solusinya bersama dengan cepat dan tepat;
- Lakukan koordinasi intensif dengan Stakeholder agar kegiatan yang melibatkan pihak luar bisa berjalan sesuai rencana;
- Lakukan pemutakhiran RPD halaman III DIPA sesuai serapan anggaran dengan memperhatikan jadwal revisi yang telah ditentukan;
- Pengelola keuangan agar memperhatikan aturan keuangan yang berlaku terutama untuk indikator penilaian IKPA agar nilai kinerja anggaran kita maksimal.

Tanah Datar, 20 Mei 2024

Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Undri
NIP 197707012009021001



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



LAPORAN
KINERJA
2024



Laporan Kinerja Triwulan 2
Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III
Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III selama Triwulan 2 Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan 2

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	81	Unit	0	39
2.	[SK 2.0] Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah	[IKK 2.1] Jumlah event kebudayaan daerah	32	Kegiatan	19	15
3.	[SK 3.0] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	[IKK 3.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	39	Orang/ Kelompok Masyarakat	0	0
4.	[SK 4.0] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Kabupaten Tanah Datar	[IKK 4.1] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Kabupaten Tanah Datar	BB	Predikat	-	-
5.	[SK 4.0] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Kabupaten Tanah Datar	[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Kabupaten Tanah Datar	93	Nilai	0	0

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan 2

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[526051.DH.6963.ABH.001] Naskah Pelestarian Warisan Budaya	Rekomendasi Kebijakan	12	0	12	608.605.000	10.680.000	597.925.000
[526051.DH.6963.PEG.001] Giat Warisan Budaya	Kegiatan	12	0	12	3.687.075.000	838.296.605	2.848.778.395
[526051.DH.6963.QDD.001] Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya	Kelompok Masyarakat	25	0	25	581.050.000	0	581.050.000
[526051.DH.6963.QMA.001] Data dan Informasi Warisan Budaya	layanan	11	0	11	976.785.000	280.524.713	696.260.287
[526051.DH.6963.RDN.001] Cagar Budaya ODCB dan OPK Yang Dilestarikan	unit	18	0	18	5.460.770.000	1.103.755.919	4.357.014.081
[526051.WA.5180.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	1	991.530.000	296.477.870	695.052.130
[526051.WA.5180.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	1	10.412.536.000	4.242.778.544	6.169.757.456
[526051.WA.5180.EBB.971] Layanan Prasarana Internal	Unit	1	0	1	4.063.657.000	25.818.600	4.037.838.400
Total					26.782.008.000	6.798.332.251	19.983.675.749

D. Rekomendasi Pimpinan

- Melihat capaian kinerja triwulan 2 dengan nilai IKPA di atas 90, dan lebih rendah dibanding nilai IKPA triwulan 1, maka untuk triwulan yang akan datang agar memperhatikan dan memperbaiki kekurangan yang ada di triwulan sebelumnya;
- Rapat evaluasi triwulan tetap dilakukan agar bisa melihat kendala dan permasalahan yang ada dan kita carikan solusinya bersama dengan cepat dan tepat;
- Lakukan koordinasi intensif dengan Stakeholder agar kegiatan yang melibatkan pihak luar bisa berjalan sesuai rencana;
- Lakukan pemutakhiran RPD halaman III DIPA sesuai serapan anggaran dengan memperhatikan jadwal revisi yang telah ditentukan;
- Pengelola keuangan agar memperhatikan aturan keuangan yang berlaku terutama untuk indikator penilaian IKPA agar nilai kinerja anggaran kita maksimal.



Laporan Kinerja Triwulan 3
Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III
Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III selama triwulan 3 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi				
[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	81	Unit	40	39
[SK 2] Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah				
[IKK 2.1] Jumlah event kebudayaan daerah	32	Kegiatan	29	11
[SK 3] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola				
[IKK 3.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	39	Orang/Kelompok Masyarakat	30	25
[SK 4] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Kabupaten Tanah Datar				
[IKK 4.1] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Kabupaten Tanah Datar	BB	Predikat	-	-
[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Kabupaten Tanah Datar	93	Nilai	0	0

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DH.6963.ABH.001] Naskah Pelestarian Warisan Budaya	Rekomendasi Kebijakan	12	7	5	Rp608.605.000	Rp435.150.763	Rp153.454.237
[DH.6963.PEG.001] Giat Warisan Budaya	Kegiatan	12	13	0	Rp3.687.075.000	Rp2.528.864.557	Rp1.158.210.443

LAPORAN
KINERJA
2024

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DH.6963.QDD.001] Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya	Kelompok Masyarakat	25	25	0	Rp581.030.000	Rp343.225.000	Rp33.825.000
[DH.6963.QMA.001] Data dan Informasi Warisan Budaya	layanan	11	11	0	Rp976.783.000	Rp448.397.713	Rp528.387.287
[DH.6963.RDN.001] Cagar Budaya, ODCB dan OPK Yang Dilestarikan	unit	18	18	0	Rp5.460.770.000	Rp2.145.967.209	Rp3.314.802.791
[WA.5180.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	0	1	Rp10.000.000	Rp0	Rp10.000.000
[WA.5180.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	0	Rp981.530.000	Rp579.717.945	Rp401.812.055
[WA.5180.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	Rp9.801.736.000	Rp7.840.234.156	Rp1.961.501.844
[WA.5180.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	6	0	6	Rp1.809.400.000	Rp0	Rp1.809.400.000
[WA.5180.EBB.971] Layanan Prasarana Internal	Unit	1	0	1	Rp2.254.257.000	Rp261.986.221	Rp1.992.270.779
Total Anggaran					Rp26.171.208.000	Rp14.805.543.564	Rp11.365.664.436

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Agar memperhatikan realisasi dan target pada halaman III DIPA dan melakukan revisi Halaman III DIPA sesuai jadwal yang telah ditentukan;
2. Mempercepat pelaksanaan kegiatan dan Belanja anggaran serta melakukan optimalisasi anggaran jika terdapat sisa pelaksanaan kegiatan;
3. Agar memaksimalkan nilai penyelesaian UP TUP dengan memperhatikan realisasi belanja anggaran

Tanah Datar, 1 November 2024


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan
 Wilayah III
 Undri



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE





Laporan Kinerja Triwulan 4
Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III
Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III selama triwulan 4 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
[SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi				
[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	81	Unit	81	40
[SK 2] Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah				
[IKK 2.1] Jumlah event kebudayaan daerah	32	Kegiatan	32	39
[SK 3] Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola				
[IKK 3.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola	39	Orang/Kelompok Masyarakat	39	14
[SK 4] Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Kabupaten Tanah Datar				
[IKK 4.1] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Kabupaten Tanah Datar	BB	Predikat	BB	BB
[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Kabupaten Tanah Datar	93	Nilai	93	94.73

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DH.0903.ABH.001] Naskah Pelestarian Warisan Budaya	Rekomendasi Kebijakan	12	12	0	Rp608.605.000	Rp520.208.718	Rp88.396.282
[DH.0903.PEG.001] Giat Warisan Budaya	Kegiatan	12	13	0	Rp3.687.075.000	Rp3.272.322.557	Rp414.752.443
[DH.0903.QDD.001] Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya	Kelompok Masyarakat	25	39	0	Rp581.050.000	Rp577.235.000	Rp3.815.000

LAPORAN
KINERJA
2024

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DH.6963.QMA.001] Data dan Informasi Warisan Budaya	layanan	11	11	0	Rp976.785.000	Rp492.067.713	Rp484.717.287
[DH.6963.RDN.001] Cagar Budaya, ODCB dan OPK Yang Dilestarikan	unit	18	18	0	Rp5.460.770.000	Rp3.691.712.847	Rp1.769.057.153
[WA.5180.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	1	0	Rp10.000.000	Rp7.050.000	Rp2.950.000
[WA.5180.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	0	Rp981.530.000	Rp854.032.945	Rp127.497.055
[WA.5180.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	Rp9.801.736.000	Rp9.243.389.333	Rp558.346.667
[WA.5180.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	6	8	0	Rp2.107.400.000	Rp2.101.300.000	Rp6.100.000
[WA.5180.EBB.971] Layanan Prasarana Internal	Unit	1	1	0	Rp1.956.257.000	Rp1.925.203.386	Rp31.053.614
Total Anggaran					Rp26.171.208.000	Rp22.684.522.499	Rp3.486.685.501

D. Rekomendasi Pimpinan

1. CB, ODCB, dan OPK yang dilestarikan:

Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan Belanja anggaran serta melakukan optimalisasi sisa anggaran kegiatan untuk kegiatan fisik kontraktual

2. Giat Warisan Budaya:

Melakukan koordinasi intens dengan pihak pemda karena pelaksanaan kegiatan Giat mengikuti jadwal even daerah

3. Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya:

Memperhatikan juknis pemberian bantuan FPK tahun 2024 untuk menghindari kesalahan administrasi dalam penyaluran bantuan serta memantau laporan kegiatan final seluruh penerima bantuan FPK agar disampaikan tepat waktu.

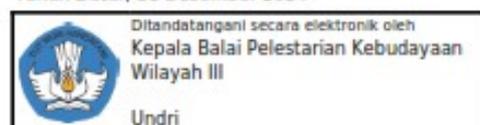
4. Nilai SAKIP:

Melengkapi dokumen pendukung SAKIP yang masih kurang dan menjadikan perhatian di masa yang akan datang.

5. Nilai Kinerja Anggaran Satker:

Memperhatikan RPD Halaman III DIPA dan jadwal yang telah disusun dalam pelaksanaan kegiatan untuk menghindari deviasi di atas 5%.

Tanah Datar, 31 Desember 2024



4. Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu

	Pernyataan	Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	<input checked="" type="checkbox"/>
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	<input checked="" type="checkbox"/>
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	<input checked="" type="checkbox"/>
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	<input checked="" type="checkbox"/>
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	<input checked="" type="checkbox"/>
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	<input checked="" type="checkbox"/>
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	<input checked="" type="checkbox"/>

**Pernyataan Telah Direviu
Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III
Tahun Anggaran 2024**

Kami telah mereviu laporan kinerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III untuk tahun anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tanah Datar, 30 Januari 2025

Ketua Tim Reviu,



Edoan Amril, M.Hum



**BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN
WILAYAH III**



**BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH III
PROVINSI SUMATERA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TENOLOGI**

COVER: KAWASAN PABRIK SEMEN INDARUNG I | BABIOLA

